

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELUARAN DESA DALAM
MENDUKUNG PENCAPAIAN PROGRAM SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA KURUNGAN
NYAWA DALAM PERSEPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

HELDA PRANITA

NPM. 2251010062



Program Studi: Ekonomi Syariah
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/2026 M

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELUARAN DESA DALAM
MENDUKUNG PENCAPAIAN PROGRAM SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA KURUNGAN NYAWA
DALAM PERSEPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

HELDA PRANITA

NPM. 2251010062



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM
RADEN INTANLAMPUNG
1448/2026**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELUARAN DESA DALAM
MENDUKUNG PENCAPAIAN PROGRAM SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA KURUNGAN NYAWA
DALAM PERSEPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

HELDA PRANITA

NPM. 2251010062

Program Studi Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing I : Dr. Madnasir. SE., M. Si

Dosen Pembimbing II : Nurhayati S.Kom., M.M

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM
RADEN INTAN LAMPUNG**

1448/2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengeluaran desa sebagai instrumen kebijakan publik untuk mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Desa Kurungan Nyawa memiliki potensi sumber daya alam, kelembagaan, dan masyarakat yang cukup kuat, tetapi kebutuhan pembangunan masih lebih besar daripada kemampuan anggaran desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengeluaran desa, kesesuaian perencanaan, alokasi, dan realisasi dengan prioritas SDGs Desa, kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan perangkat Desa Kurungan Nyawa pada 17 Juli 2026, observasi, dan dokumentasi, terutama profil desa, data kelembagaan, serta informasi perencanaan dan pengeluaran desa. Informan penelitian meliputi kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, kaur umum, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dan kasi pelayanan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan, dan pemeriksaan keabsahan melalui triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengeluaran desa telah dilakukan melalui mekanisme partisipatif dan berjenjang, dimulai dari musyawarah tingkat dusun hingga Musyawarah Desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa dan APBDes. Alokasi pengeluaran diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti bantuan sosial, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan jalan, air bersih, sanitasi, dan ekonomi lokal. Program tersebut relevan dengan beberapa tujuan SDGs Desa, meskipun integrasi indikator, kualitas data, kapasitas aparatur, dan keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan. Dengan demikian, pengeluaran Desa Kurungan Nyawa berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, tetapi membutuhkan penguatan perencanaan berbasis data dan evaluasi capaian.

Kata Kunci: Pengeluaran Desa; SDGs Desa; APBDes; Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of village expenditure as a public policy instrument to accelerate the achievement of the Village Sustainable Development Goals (Village SDGs). Kurungan Nyawa Village has natural resources, active institutions, and community participation; however, development needs remain greater than the available village budget. This study aims to analyze village expenditure implementation, its alignment with Village SDGs priorities, its contribution to community development, and its supporting and inhibiting factors.

This research used a descriptive qualitative approach through field research. Data were collected through interviews with Kurungan Nyawa Village officials on July 17, 2026, observation, and documentation, including village profile documents, institutional data, and information on village planning and expenditure. The informants were the village head, village secretary, finance officer, planning officer, general affairs officer, head of government affairs, head of welfare affairs, and head of service affairs. Data were analyzed through reduction, display, conclusion drawing, and source and technique triangulation.

The findings show that village expenditure has been implemented through a participatory and sequential mechanism, beginning with hamlet-level deliberations and continuing to the Village Deliberation Forum as the basis for preparing the Village Government Work Plan and Village Budget. Expenditure allocation is directed toward basic community needs, including social assistance, food security, health services, education, road construction, clean water, sanitation, and local economic development. These programs support several Village SDGs targets, although indicator integration, data quality, apparatus capacity, and budget limitations remain obstacles. Thus, village expenditure contributes to sustainable development but requires stronger data-based planning and evaluation.

Keywords: Village Expenditure; Village SDGs; Village Budget; Sustainable Development.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp.
(0721) 703289

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Helda Pranita
NPM : 2251010062
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Artikel Ilmiah yang berjudul “Analisis Implementasi Pengeluaran Desa Dalam Mendukung Pencapaian Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa Kurungan Nyawa Dalam Persepektif Maqashid Syariah” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Mei 2026



Helda Pranita

Npm. 2251010062



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp.
(0721) 703289**

PERSETUJUAN

Judul : Analisis Implementasi Pengeluaran Desa
Dalam Mendukung Pencapaian Program
Sustainable Development Goals (Sdgs)
Desa Kurungan Nyawa Dalam Persepektif
Maqashid Syariah
Nama : Helda Pranita
NPM : 2251010062
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Madnasir, SE., M. Si
NIP. 1975042420002121001

Pembimbing II

Nurhayati S. Kom., M.M
NIP. 19901014202012216

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Anas Malik M.E.Sy



NIP. 198905062019031014

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721)
703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Analisis Implementasi Pengeluaran Desa Dalam Mendukung Pencapaian Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa Kurungan Nyawa Dalam Persepektif Maqashid Syariah" disusun oleh, Helda Pranita, NPM : 2251010062, Program Studi Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa / 30 Juli / 2026.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E

Sekretaris : Anggun Okta Fitri, M.M

Penguji I : Anas Malik, M.e., Sy

Penguji II : Nurhayati S.Kom., M.M

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H

NIP. 19720826 200312 1 002

MOTTO

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

QS. Al-Qashash [28]: 77

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kupersembahkan ke hadirat Allah SWT. Rabb Semesta alam, atas rahmat, kekuatan, dan petunjuk-Nya yang senantiasa menyertai langkahku hingga akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Cinta pertama saya Ayahanda tercinta, Helman Arif. Sosok pertama yang menyambut kehadiran saya ke dunia dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih telah berjuang dalam mengupayakan kehidupan yang terbaik untuk anak perempuan satu-satunya ini, berkorban keringat, tenaga dan pikiran. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik saya memberikan motivasi, dukungan moral dan material serta doa sehingga meringankan langkah saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibunda Tercinta, Rita Hisnara. Sosok luar biasa yang menjadi tempat pendidikan perama saya. Terima kasih sebesar-besarnya atas cinta yang tidak bertepi dan pengorbanan yang tak terhingga. Terima kasih telah menjadi wanita kuat, hebat dan sabar untuk mendampingi saya dari awal hingga bisa berada di titik ini. Terima kasih sudah menjadi sosok terbaik yang selalu mengusahakan apapun untuk anak perempuan satu-satunya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya, meskipun beliau sendiri tidak merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Terima kasih sekali lagi atas segala kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya.
3. Teruntuk Saudara kandungku tersayang. Briptu Andree Ari Pratama, Prada Anggy Dharma Jaya, dan tak lupa kakak iparku dan Keponakanku Viona Adelia Andini Putri, Amd.Keb, Rizaidan Pratama Drena yang selalu memberikan dukungan, canda tawa, dan semangat di saat aku lelah dan hampir menyerah. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi. Di antara tawa yang kita bagi, nasihat yang kalian berikan, dan doa yang selalu mengiringi, aku menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa aku tidak pernah benar-benar sendiri, bahkan di saat terberat sekalipun, semoga kebersamaan ini selalu menjadi sumber semangat.
4. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Helda Pranita. Anak perempuan pertama dan

harapan orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama lengkap Helda Pranita dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 Desember 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Helman Arif dan Ibu Rita Hisnara. Riwayat pendidikan penulis dimulai pada tahun ajaran 2009 di Sekolah Taman Kanak-kanak Budaya, dan berhasil menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 02 Sumberjo pada tahun ajaran 2010 dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP 13 Bandar Lampung pada tahun ajaran 2016 dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas ditempuh di SMA 07 Bandar Lampung pada tahun ajaran 2019 dan berhasil diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Nrgri Raden Intan Lampung Program Strata 1 (S1) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Bandar Lampung, 25 Mei 2026

Helda Pranita
Npm. 2251010062

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur dipajatkan kehadiran Allah SWT berkah rahmat, hidayah, anugrah dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Peluang Penerapan Green Sukuk Sebagai Instrumen Pembiayaan Desa Berkelanjutan di Desa Kurungan Nyawa Kabupaten Pesawaran”. Serta Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh akhlakul karimah bagi seluruh muslim penjuru dunia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajaran Wakil Dekan I, II, Dan III.
2. Anas Malik, M.E. Sy, selaku Ketua program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Madnasir. SE., M. SI, dan Ibu Nurhayati S. Kom., M.M selaku pembimbing I dan II yang senantiasa sabar dan meluangkan waktu banyak untuk memberikan kritik, saran dan arahan kepada penulis sehingga terselesaikan Skripsi ini.
4. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
5. Kepada Keluarga Besar yang penulis cintai, yang senantiasa menyertai dengan doa dan dukungan tulus sepanjang perjalanan studi, khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Segala bentuk perhatian serta kasih sayang menjadi kekuatan utama dalam setiap langkah penulis.
6. Kepada partner teman hidup saya yang terkasih yang tak kalah penting kehadirannya. M. Farid Tamsya S.M, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran, materi maupun moril. Terima kasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Telah menjadi rumah tempat berkeluh kesahku diwaktu lelahmu, menjadi pendengar yang baik, menghibur, penasehat yang baik, senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua.... Aamiin.

7. Sahabat terbaikku Sabrina Rahmadaniya, A.Md. Kes Terima kasih sudah setia menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini. Kamu adalah manusia hebat yang penulis temui disepanjang perjalanan hidup penulis. Semoga setelah ini kebahagiaan akan terus menghampiri mu dan semoga kita akan menggapai semua angan dan cita-cita dengan kemudahan dan keberkahan dari Allah SWT, Aamiin.
8. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah Khususnya Kelas H dan seluruh Teman-teman Ekonomi Syariah Angkatan 2022.
9. Almameter ku tercinta, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan tempat dalam menuntut ilmu pengetahuan serta pengalaman yang tak ternilai harganya.
10. Kepada seluruh staf akademik dan kemahasiswaan yang selama ini selalu siap membantu dengan penuh kesabaran dan profesionalisme. Dukungan mereka dalam mengurus berbagai administrasi dan kelancaran proses akademik memberikan kemudahan yang sangat berarti bagi penulis. Tanpa bantuan mereka perjalanan studi ini tidak akan berjalan sebaik dan selancar yang dirasakan saat ini.
11. Terakhir, semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada kita semua, dan berkenan membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyajian maupun penyusunan materinya, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran, kritik, dan masukan yang membangun untuk penulis agar Skripsi ini dapat menjadi rujukan atau referensi yang bermanfaat bagi orang lain.

Bandar lampung 25 Mei 2026

Helda Pranita
Npm. 2251010062

DAFTAR ISI

ABSTRACT	iii
PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	14
D. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	17
E. Rumusan Masalah	19
F. Tujuan Penelitian.....	20
G. Manfaat Penelitian	20
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	22
BAB II LANDASAN TEORI	35
A. Teori Kebijakan Publik.....	35
B. Pengeluaran Desa.....	44
C. Sustainable Development Goals (SDGs) Desa	53
D. Pembangunan Berkelanjutan	64
E. Teori Maqashid Syariah	74
F. Kerangka Berpikir	84
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.

A. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Sistematika Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	91
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	91
1. Profil Desa Kurungan Nyawa.....	91
2. Visi dan Misi Desa Kurungan Nyawa	93
3. Struktur Pemerintahan Desa Kurungan Nyawa	96
4. Kondisi Sosial, Fisik, Sarana, dan Prasarana Desa.....	98
5. Potensi Desa dan Relevansinya dengan SDGs Desa	Error! Bookmark not defined.
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	101
1. Data Informan Penelitian.....	101
2. Fakta Perencanaan Pengeluaran Desa	102
3. Fakta Alokasi Pengeluaran Desa	105
4. Fakta Faktor Pendukung dan Penghambat	108
C. Analisis Data Penelitian.....	112
1. Analisis Implementasi Perencanaan Pengeluaran Desa.....	112
2. Analisis Alokasi Pengeluaran Desa terhadap SDGs Desa....	113
3. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi.	116
4. Analisis Pengeluaran Desa dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Maqashid Syariah	118
5. Simpulan Analisis Sementara.....	120
D. Temuan Penelitian	121
1. Implementasi Pengeluaran Desa dalam Mendukung SDGs Desa	122
2. Kesesuaian Pengeluaran Desa dengan Prioritas SDGs Desa	126
3. Faktor Pendukung Implementasi Pengeluaran Desa	129
4. Faktor Penghambat Implementasi Pengeluaran Desa.....	132

5. Implikasi Temuan Penelitian	135
BAB V PENUTUP	139
A. Simpulan	139
B. Rekomendasi.....	144
DAFTAR RUJUKAN	148
LAMPIRAN	175
Lampiran 4. profil desa kurungan nyawa	178
Lampiran 4. Dokumentasi Pra Penelitian	179

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

2. Pengeluaran Desa

Pengeluaran desa dalam penelitian ini didefinisikan sebagai belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Definisi operasional ini digunakan sebagai satu-satunya batasan konsep pengeluaran desa dalam penelitian, sehingga analisis diarahkan pada perencanaan, alokasi, realisasi, akuntabilitas, dan manfaat belanja bagi masyarakat.

4. *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa merupakan upaya melokalkan agenda pembangunan berkelanjutan ke tingkat desa melalui pengintegrasian dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola. Kerangka tersebut mengarahkan pembangunan desa agar tidak hanya mengejar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, menjaga lingkungan, serta memperkuat kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Berbeda dari SDGs global yang memiliki 17 tujuan, SDGs

Desa mengembangkan 18 tujuan dengan tambahan tujuan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.¹

B. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa pada dasarnya merupakan proses perubahan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kapasitas ekonomi, pemerataan akses layanan, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam kondisi ideal, pembangunan tidak hanya dilihat dari bertambahnya infrastruktur fisik, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, produktif, berpendidikan, berdaya, dan memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan.²

Dalam perspektif ekonomi publik, pengeluaran pemerintah merupakan instrumen penting untuk mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan manfaat, dan menstabilkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengeluaran desa sebagai bagian dari belanja sektor publik seharusnya menjadi sarana untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung karena desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan warga. Oleh sebab itu, kualitas pengeluaran desa perlu dinilai bukan hanya dari

¹ Reni Febriani dan Suryadi Samudra, "Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa sebagai Upaya Menuju Kemandirian Desa Kotarindau," *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023): 337–340.

² Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12th ed. (Boston: Pearson, 2015), 14-17; Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 3-11.

jumlah anggaran yang terserap, melainkan juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.³

Secara kelembagaan, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah. Kewenangan tersebut memberi ruang bagi pemerintah desa untuk menyusun perencanaan, menetapkan prioritas, dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kebutuhan lokal. Dalam kondisi ideal, APBDesa harus menjadi alat pembangunan yang menghubungkan aspirasi masyarakat, program prioritas, dan capaian pembangunan yang terukur.⁴

Pengelolaan pengeluaran desa juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip tata kelola keuangan publik. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran. Prinsip tersebut penting karena pengeluaran desa menyangkut dana publik yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan

³ Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, 5th ed. (New York: McGraw-Hill, 1989), 5-13; Joseph E. Stiglitz dan Jay K. Rosengard, *Economics of the Public Sector*, 4th ed. (New York: W. W. Norton, 2015), 7-12.

⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 73-80; Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 30-43.

harus memiliki dasar kebutuhan, sasaran program, dan manfaat pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pengeluaran desa idealnya tidak hanya diarahkan pada pembangunan jangka pendek, tetapi juga pada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola. Agenda *Sustainable Development Goals* menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus dilihat secara terpadu karena pengurangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan layak, infrastruktur, lingkungan, dan kelembagaan saling berkaitan satu sama lain.⁶

Konsep SDGs kemudian dilokalkan ke dalam SDGs Desa sebagai agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. SDGs Desa memuat 18 tujuan pembangunan yang diturunkan dari SDGs nasional dan disesuaikan dengan konteks desa, antara lain desa tanpa kemiskinan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, desa peduli lingkungan, serta kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Dengan demikian, SDGs Desa dapat dijadikan ukuran untuk menilai arah pembangunan dan penggunaan anggaran desa.⁷

⁵ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi, 2018), 20-28; Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Jakarta: Erlangga, 2010), 47-55.

⁶ Jeffrey D. Sachs, Guido Schmidt-Traub, Mariana Mazzucato, Dirk Messner, Nebojsa Nakicenovic, dan Johan Rockström, "Six Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals," *Nature Sustainability* 2 (2019): 805-814; Mark Stafford-Smith et al., "Integration: The Key to Implementing the Sustainable Development Goals," *Sustainability Science* 12, no. 6 (2017): 911-919.

⁷ David Le Blanc, "Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as a Network of Targets," *Sustainable Development* 23, no. 3 (2015): 176-187; Reni Febriani dan Suryadi Samudra, "Implementasi Sustainable Development Goals

Agar pengeluaran desa mendukung SDGs Desa, proses penyusunan program tidak cukup dilakukan secara administratif, tetapi perlu berbasis data dan partisipasi masyarakat. Perencanaan yang melibatkan masyarakat memungkinkan pemerintah desa mengetahui persoalan riil, kelompok rentan, potensi lokal, dan prioritas kebutuhan warga. Partisipasi juga memperkuat pengawasan sosial sehingga pelaksanaan kegiatan tidak hanya mengikuti dokumen anggaran, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat publik.⁸

Kajian pembangunan pedesaan menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, kepemimpinan lokal, pengetahuan masyarakat, dan kemampuan desa mengelola sumber daya bersama. Dana yang besar dapat menjadi tidak efektif apabila tidak disertai perencanaan yang tepat, koordinasi antaraktor, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Sebaliknya, dana yang terbatas tetap dapat memberi dampak apabila diarahkan pada program yang paling sesuai dengan kebutuhan lokal.⁹

Secara faktual, desa telah menjadi salah satu fokus penting kebijakan pembangunan nasional melalui alokasi

(SDGs) Desa sebagai Upaya Menuju Kemandirian Desa Kotarindau,” *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023): 337-340.

⁸ Sherry R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation,” *Journal of the American Institute of Planners* 35, no. 4 (1969): 216-224; Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 88-102.

⁹ Robert Chambers, *Rural Development: Putting the Last First* (London: Longman, 1983), 103-120; David C. Korten, “Community Organization and Rural Development: A Learning Process Approach,” *Public Administration Review* 40, no. 5 (1980): 480-511.

Dana Desa. Kementerian Keuangan mencatat bahwa pada tahun 2024 Dana Desa dialokasikan sebesar Rp71 triliun kepada 75.259 desa di 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada tahun anggaran 2025, Dana Desa kembali ditetapkan sebesar Rp71 triliun, terdiri atas Rp69 triliun yang dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan dan Rp2 triliun yang dihitung pada tahun anggaran berjalan.¹⁰

Besarnya alokasi tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki ruang fiskal yang penting untuk mempercepat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam konteks kewilayahan, data BPS menunjukkan bahwa Provinsi Lampung pada tahun 2025 memiliki 2.654 desa/kelurahan, sementara publikasi Statistik Indonesia 2025 menegaskan pentingnya data statistik pemerintah, sosial-demografi, dan ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Data ini memperlihatkan bahwa pembangunan desa di Lampung membutuhkan pengelolaan anggaran yang terarah, berbasis bukti, dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.¹¹

Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu wilayah di Provinsi Lampung juga memerlukan dukungan data yang kuat dalam proses perencanaan pembangunan. BPS Kabupaten Pesawaran menerbitkan publikasi tahunan

¹⁰ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, “Transparansi dan Keterbukaan Informasi adalah Pilar Paling Penting dalam Pengelolaan Dana Desa,” Kementerian Keuangan, 6 Agustus 2024; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, “Rincian Dana Desa per Desa TA 2025,” Kementerian Keuangan, 29 Oktober 2024.

¹¹ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2025,” Tabel Statistik BPS, 2026; Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2025 (Jakarta: BPS, 2025), 1-3.

Kabupaten Pesawaran Dalam Angka 2025 yang mencakup keadaan geografi, pemerintahan, sosial-demografi, dan perekonomian daerah. Pada tingkat kecamatan, publikasi Kecamatan Gedong Tataan Dalam Angka 2025 memuat data tahun 2024 mengenai penduduk, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, pariwisata, dan perdagangan, sehingga relevan digunakan sebagai dasar awal dalam memahami konteks pembangunan Desa Kurungan Nyawa.¹²

Meskipun ruang fiskal desa semakin besar, fenomena umum yang masih sering terjadi adalah kuatnya orientasi belanja pada kegiatan fisik dan administratif, sementara hubungan antara pengeluaran desa dengan capaian kesejahteraan belum selalu terukur secara jelas. Beberapa kajian mengenai desentralisasi desa di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan dana perlu diikuti dengan kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola perencanaan, penganggaran, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat agar tujuan pembangunan tidak berhenti pada keluaran kegiatan saja.¹³

Kesenjangan antara anggaran dan hasil pembangunan dapat terjadi ketika program yang dibiayai belum sepenuhnya berbasis kebutuhan warga atau belum dikaitkan dengan

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesawaran Dalam Angka 2025 (Pesawaran: BPS Kabupaten Pesawaran, 2025), 1-5; Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Gedong Tataan Dalam Angka 2025 (Pesawaran: BPS Kabupaten Pesawaran, 2025), 1-4.

¹³ Blane D. Lewis, "Decentralising to Villages in Indonesia: Money (and Other) Mistakes," *Public Administration and Development* 35, no. 5 (2015): 347-359; Hans Antlöv, Anna Wetterberg, dan Leni Dharmawan, "Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 52, no. 2 (2016): 161-183.

indikator capaian yang jelas. Dalam perspektif pembangunan manusia, kemiskinan dan kesejahteraan tidak hanya menyangkut pendapatan, tetapi juga akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, pekerjaan, lingkungan layak, dan partisipasi. Karena itu, belanja desa yang hanya dinilai berdasarkan serapan anggaran berisiko mengabaikan dimensi kesejahteraan yang lebih luas.¹⁴

Penelitian mengenai APBDesa menunjukkan bahwa pelaksanaan pengeluaran desa dapat menghadapi persoalan dalam aspek perencanaan, transparansi, ketepatan sasaran, dan pengawasan masyarakat. Pengeluaran yang tidak didukung data memadai dapat menyebabkan program tidak sepenuhnya menjawab masalah prioritas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi pengeluaran desa perlu ditelaah lebih jauh, terutama untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran telah benar-benar mendukung pembangunan yang berkelanjutan.¹⁵

Dalam kajian implementasi kebijakan, keberhasilan program ditentukan oleh kejelasan tujuan, sumber daya, komunikasi, struktur pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial politik yang mempengaruhinya. Hal tersebut relevan dengan pengeluaran desa karena APBDesa merupakan kebijakan tahunan yang harus diterjemahkan ke

¹⁴ Sabina Alkire dan James Foster, "Counting and Multidimensional Poverty Measurement," *Journal of Public Economics* 95, no. 7-8 (2011): 476-487; Amartya Sen, *Development as Freedom*, 87-110.

¹⁵ Ersantiana Kue Wea dan Any Rustia Dewi, "Analisis Pelaksanaan Pengeluaran Biaya APBDesa dalam Menunjang Pembangunan Desa," *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan* 1, no. 1 (2019): 4-7; Sumiati, "Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran," *Jurnal MODERAT* 4, no. 4 (2018): 124-130.

dalam kegiatan nyata. Apabila perencanaan tidak jelas, sumber daya terbatas, atau pelaksana tidak memahami sasaran program, maka capaian pembangunan desa juga dapat menjadi kurang optimal.¹⁶

Kesenjangan lain muncul pada hubungan antara dokumen perencanaan desa dan agenda SDGs Desa. Secara ideal, RKPDesa dan APBDesa perlu menjadi instrumen yang mengarahkan belanja kepada tujuan SDGs Desa yang paling sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun dalam praktik, keterhubungan tersebut sering belum dinilai secara sistematis. Akibatnya, pemerintah desa dapat saja melaksanakan kegiatan pembangunan, tetapi belum diketahui secara jelas kontribusinya terhadap tujuan seperti desa tanpa kemiskinan, desa sehat, pendidikan berkualitas, infrastruktur sesuai kebutuhan, atau kelembagaan desa yang dinamis.¹⁷

Kualitas belanja publik juga menuntut adanya efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan keluaran tertentu, sedangkan efektivitas berkaitan dengan sejauh mana keluaran tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks desa, pengeluaran yang efektif adalah pengeluaran yang mampu menjawab masalah masyarakat, memperkuat pelayanan

¹⁶ Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445-488; George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 1980), 9-12.

¹⁷ Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World* (Princeton: Princeton University Press, 1980), 6-15; Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy* (Glenview: Scott, Foresman and Company, 1983), 20-35.

publik, dan memberi dampak pada indikator pembangunan, bukan sekadar menghabiskan anggaran yang tersedia.¹⁸

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas SDGs Desa sebagai upaya menuju kemandirian desa dan memperlihatkan bahwa keberhasilan pencapaiannya memerlukan koordinasi, data, partisipasi, serta kemampuan kelembagaan. Namun, penelitian tersebut lebih banyak menjelaskan pelaksanaan SDGs Desa secara umum. Masih diperlukan kajian yang secara khusus menempatkan pengeluaran desa sebagai objek analisis untuk melihat apakah realisasi belanja desa sudah sesuai dengan agenda SDGs Desa.¹⁹

Kajian lain mengenai penerapan SDGs Desa juga menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan dapat bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman aparat, keterbatasan data, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Temuan tersebut memperkuat kebutuhan untuk meneliti implementasi pengeluaran desa, sebab penggunaan anggaran yang tidak disertai pemahaman SDGs Desa dapat membuat program pembangunan berjalan secara rutin administratif, tetapi

¹⁸ Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah (Jakarta: Erlangga, 2010), 85-96; Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 33-45.

¹⁹ Reni Febriani dan Suryadi Samudra, "Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa sebagai Upaya Menuju Kemandirian Desa Kotarindau," Jurnal Ilmiah Publika 11, no. 1 (2023): 337-340; Frank Biermann et al., "Scientific Evidence on the Political Impact of the Sustainable Development Goals," Nature Sustainability 5 (2022): 795-800.

belum sepenuhnya menjadi strategi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.²⁰

Dari sisi literatur SDGs, terdapat penekanan bahwa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan membutuhkan integrasi lintas sektor dan pengukuran yang saling terhubung. Tujuan pembangunan tidak dapat dicapai secara terpisah karena program infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, pengeluaran desa perlu dianalisis dengan pendekatan terpadu agar dapat diketahui keterkaitannya dengan beberapa tujuan SDGs Desa sekaligus.²¹

Dalam praktik pembangunan berbasis masyarakat, ketepatan sasaran juga menjadi isu penting. Program yang dirancang tanpa pemetaan kebutuhan dan kelompok penerima manfaat dapat tidak tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, atau kelompok rentan lainnya. Penelitian mengenai penargetan bantuan sosial di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas data dan mekanisme seleksi sangat berpengaruh terhadap akurasi penerima manfaat. Hal ini relevan bagi pengeluaran desa

²⁰ Muhammad Fardh'lu Rizky dan Dadang Mashur, "Penerapan Sustainable Development Goals Desa di Desa Perkebunan Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 15 (2022): 385-394; Michael Lipsky, *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services* (New York: Russell Sage Foundation, 1980), 3-12.

²¹ David Le Blanc, "Towards Integration at Last?," 176-187; Mark Stafford-Smith et al., "Integration: The Key to Implementing the Sustainable Development Goals," 911-919.

karena program desa seharusnya memberikan manfaat kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.²²

Desa Kurungan Nyawa sebagai lokasi penelitian berada dalam wilayah Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Sebagai desa yang menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat melalui APBDesa, Desa Kurungan Nyawa perlu dilihat dari sejauh mana pengeluarannya telah diarahkan kepada program yang mendukung SDGs Desa. Pemilihan lokasi ini menjadi penting karena analisis berbasis desa dapat memberikan gambaran yang lebih dekat dengan realitas pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, dan manfaat program bagi masyarakat.²³

Permasalahan penelitian ini berangkat dari adanya jarak antara kondisi ideal dan kondisi faktual. Secara ideal, pengeluaran desa harus mendukung pencapaian SDGs Desa melalui program yang partisipatif, berbasis data, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Akan tetapi, secara faktual belum selalu tersedia kajian yang menunjukkan keterkaitan langsung antara alokasi dan realisasi pengeluaran Desa Kurungan Nyawa dengan tujuan SDGs Desa. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian.²⁴

²² Vivi Alatas et al., "Targeting the Poor: Evidence from a Field Experiment in Indonesia," *American Economic Review* 102, no. 4 (2012): 1206-1240; Sabina Alkire dan James Foster, "Counting and Multidimensional Poverty Measurement," 476-487.

²³ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 17-28; Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 89-96.

²⁴ Christopher Hood, "A Public Management for All Seasons?," *Public Administration* 69, no. 1 (1991): 3-19; Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 27-35.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai apakah pengeluaran desa telah menjadi instrumen pembangunan yang efektif atau hanya menjadi kegiatan rutin tahunan. Apabila masalah ini tidak dikaji, pemerintah desa dapat kehilangan dasar evaluasi dalam menyusun prioritas anggaran berikutnya. Dampaknya, program yang dibiayai berpotensi tidak sepenuhnya menyentuh persoalan strategis seperti kemiskinan, kualitas layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, lingkungan, dan penguatan kelembagaan desa.²⁵

Penelitian mengenai implementasi pengeluaran desa juga penting untuk memperkuat akuntabilitas publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran desa digunakan, apa hasilnya, siapa penerima manfaatnya, dan bagaimana kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan. Transparansi dan pertanggungjawaban bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari kepercayaan sosial antara pemerintah desa dan masyarakat. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi keberlanjutan program pembangunan desa.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul “Analisis Implementasi Pengeluaran Desa dalam Mendukung Pencapaian Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Kurungan Nyawa” perlu dilakukan untuk mengkaji proses perencanaan, alokasi, pelaksanaan, realisasi, kendala,

²⁵ Edward B. Barbier, “The Concept of Sustainable Economic Development,” *Environmental Conservation* 14, no. 2 (1987): 101-110; Kate Raworth, *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist* (London: Random House Business Books, 2017), 44-58.

²⁶ Dwipayana Ari dan Sutoro Eko, *Membangun Good Governance di Desa* (Yogyakarta: IRE Press, 2003), 15-28; Sherry R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation,” 216-224.

dan kontribusi pengeluaran desa terhadap SDGs Desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kualitas penggunaan anggaran desa serta menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam menyusun kebijakan pengeluaran yang lebih terarah, transparan, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.²⁷

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini perlu diarahkan secara jelas agar pembahasan tidak melebar dari pokok persoalan yang dikaji. Identifikasi masalah digunakan untuk menunjukkan sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pengeluaran desa, sedangkan batasan masalah digunakan untuk menetapkan ruang lingkup penelitian agar analisis lebih fokus, mendalam, dan sesuai dengan kemampuan data yang dapat diperoleh di lapangan.²⁸

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berangkat dari adanya kebutuhan untuk melihat apakah pengeluaran desa telah dilaksanakan sesuai dengan arah pembangunan berkelanjutan. Pengeluaran desa idealnya tidak hanya berorientasi pada terserapnya anggaran, tetapi juga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, penguatan

²⁷ Paul A. Sabatier dan Daniel A. Mazmanian, "The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis," *Policy Studies Journal* 8, no. 4 (1980): 538-560; Ersantiana Kue Wea dan Any Rustia Dewi, "Analisis Pelaksanaan Pengeluaran Biaya APBDesa dalam Menunjang Pembangunan Desa," 4-7.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 94-97.

pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan, serta pencapaian tujuan SDGs Desa.²⁹

- a. Pengeluaran Desa Kurungan Nyawa belum seluruhnya dipetakan secara jelas berdasarkan tujuan dan indikator SDGs Desa, sehingga hubungan antara program yang dibiayai desa dengan sasaran pembangunan berkelanjutan masih perlu dikaji secara lebih mendalam.
- b. Perencanaan pengeluaran desa belum tentu sepenuhnya berbasis data kebutuhan masyarakat dan data SDGs Desa, padahal perencanaan berbasis data diperlukan agar program desa lebih tepat sasaran.
- c. Alokasi dan realisasi belanja desa sering kali lebih mudah dilihat dari sisi keluaran kegiatan, seperti pembangunan fisik atau terselenggaranya program, tetapi belum selalu menunjukkan manfaat langsung terhadap pencapaian tujuan SDGs Desa.
- d. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengeluaran desa masih perlu dianalisis karena partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam pembangunan desa yang inklusif.
- e. Belum terdapat gambaran yang utuh mengenai bidang pengeluaran desa yang paling berkontribusi terhadap pencapaian SDGs Desa, baik pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, maupun kelembagaan.
- f. Pelaksanaan pengeluaran desa masih berpotensi menghadapi hambatan, seperti keterbatasan sumber daya

²⁹ Ersantiana Kue Wea dan Any Rustia Dewi, “Analisis Pelaksanaan Pengeluaran Biaya APBDesa dalam Menunjang Pembangunan Desa,” *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan* 1, no. 1 (2019): 4-7.

aparatur, kualitas data, koordinasi antar pihak, pemahaman masyarakat, serta kesinambungan program.

- g. Dokumentasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengeluaran desa perlu dilihat bukan hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari sisi keterbukaan informasi dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.³⁰

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka pembahasan dibatasi pada pelaksanaan pengeluaran desa yang berkaitan dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kurungan Nyawa. Batasan ini diperlukan karena pengeluaran desa memiliki cakupan yang luas, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada analisis implementasi dan kontribusinya terhadap pencapaian SDGs Desa, bukan pada audit keuangan secara rinci.³¹

- a. Lokasi penelitian dibatasi pada Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
- b. Objek penelitian dibatasi pada pengeluaran desa yang tercantum dalam APBDesa dan berkaitan dengan program pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan lain yang relevan dengan tujuan SDGs Desa.
- c. Penelitian ini tidak membahas pemeriksaan keuangan desa dalam bentuk audit hukum atau audit akuntansi

³⁰ Sumiati, "Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran," *Jurnal MODERAT* 4, no. 4 (2018): 124-130.

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 dan Pasal 15-16.

secara teknis, tetapi menganalisis proses implementasi, kesesuaian program, manfaat, serta kendala pelaksanaan pengeluaran desa.

- d. Analisis SDGs Desa difokuskan pada tujuan-tujuan yang relevan dengan kondisi dan program Desa Kurungan Nyawa, sehingga tidak seluruh 18 tujuan SDGs Desa dibahas dengan porsi yang sama.
- e. Data penelitian dibatasi pada dokumen perencanaan dan realisasi pengeluaran desa yang tersedia pada periode penelitian, hasil wawancara dengan informan terkait, observasi, serta dokumentasi pendukung.
- f. Informan penelitian dibatasi pada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penerima manfaat pengeluaran desa, seperti pemerintah desa, BPD, pendamping desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima manfaat.

D. Fokus dan Subfokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian diperlukan untuk membatasi ruang kajian sekaligus mengarahkan proses pengumpulan dan analisis data. Fokus penelitian membantu peneliti menentukan informasi yang perlu digali, sumber data yang relevan, serta batas interpretasi agar hasil penelitian tidak keluar dari masalah utama yang diteliti.³²

³² John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018), 54-60.

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah analisis implementasi pengeluaran Desa Kurungan Nyawa dalam mendukung pencapaian program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Fokus tersebut diarahkan untuk memahami bagaimana pengeluaran desa direncanakan, dialokasikan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus penelitian digunakan untuk memperjelas bagian-bagian penting yang akan dianalisis dalam penelitian. Adapun subfokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengeluaran desa, yaitu proses penyusunan program dan kegiatan desa yang dibiayai melalui APBDesa serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat dan arah SDGs Desa.
- b. Alokasi dan realisasi pengeluaran desa, yaitu pembagian anggaran pada setiap bidang belanja desa dan pelaksanaannya dalam kegiatan nyata di Desa Kurungan Nyawa.
- c. Keterkaitan pengeluaran desa dengan SDGs Desa, yaitu hubungan antara program yang dibiayai desa dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan kondisi desa.
- d. Manfaat pengeluaran desa bagi masyarakat, yaitu hasil atau perubahan yang dirasakan oleh masyarakat dari

program dan kegiatan yang telah dibiayai oleh pemerintah desa.

- e. Faktor pendukung dan penghambat implementasi pengeluaran desa dalam pencapaian SDGs Desa, baik yang berasal dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, data, maupun koordinasi antar pihak.³³

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, serta fokus penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk menjadi arah utama pembahasan. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengeluaran Desa Kurungan Nyawa dalam mendukung pencapaian program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa?
2. Bagaimana kesesuaian perencanaan, alokasi, dan realisasi pengeluaran desa dengan prioritas SDGs Desa di Desa Kurungan Nyawa?
3. Bagaimana kontribusi pengeluaran desa dalam pencapaian program SDGs Desa yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa Kurungan Nyawa?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi pengeluaran desa dalam mendukung pencapaian program SDGs Desa di Desa Kurungan Nyawa?

³³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), 31-33.

5. Bagaimana kontribusi pengeluaran desa terhadap indikator SDGs Desa terpilih dan kemaslahatan masyarakat dalam perspektif maqashid syariah?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah agar arah penelitian memiliki kesesuaian antara masalah yang diajukan dengan hasil yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi pengeluaran Desa Kurungan Nyawa dalam mendukung pencapaian program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
2. Untuk menganalisis kesesuaian perencanaan, alokasi, dan realisasi pengeluaran desa dengan prioritas SDGs Desa di Desa Kurungan Nyawa.
3. Untuk menganalisis kontribusi pengeluaran desa terhadap indikator SDGs Desa terpilih dan maqashid syariah.
4. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi pengeluaran desa dalam mendukung pencapaian program SDGs Desa di Desa Kurungan Nyawa.³⁴

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut berkaitan dengan pengembangan kajian akademik mengenai pengeluaran desa dan SDGs Desa, sekaligus memberikan

³⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 88-92.

masukannya bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam memperkuat kualitas pembangunan desa berkelanjutan.³⁵

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu ekonomi pembangunan Islam, keuangan publik desa, dan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademik mengenai bagaimana pengeluaran desa dapat dianalisis tidak hanya dari sisi administrasi anggaran, tetapi juga dari sisi kontribusinya terhadap pencapaian SDGs Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa Kurungan Nyawa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun perencanaan, alokasi, pelaksanaan, dan pelaporan pengeluaran desa agar lebih sesuai dengan prioritas SDGs Desa.
- b. Bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
- c. Bagi masyarakat Desa Kurungan Nyawa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai

³⁵ Reni Febriani dan Suryadi Samudra, "Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa sebagai Upaya Menuju Kemandirian Desa Kotarindau," *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023): 337-340.

pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pengeluaran desa.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi awal untuk mengembangkan kajian mengenai hubungan antara pengeluaran desa, efektivitas program pembangunan, dan pencapaian SDGs Desa dalam konteks wilayah yang berbeda.³⁶

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada ruang lingkup penelitian ini, peneliti meninjau sepuluh penelitian terdahulu dalam empat tahun terakhir yang berkaitan dengan pengeluaran desa, pengelolaan Dana Desa, APBDes, dan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Kajian penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui posisi penelitian, membandingkan metode dan fokus kajian, serta menemukan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Hanif, Mardhiyah Hayati, dan Desma Susilawati mengenai kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam di Pekon Gisting Bawah, Kabupaten Tanggamus.¹ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran BUMDes dalam pengembangan potensi desa dan peningkatan kesejahteraan

³⁶ Muhammad Fardh'lu Rizky dan Dadang Mashur, "Penerapan Sustainable Development Goals Desa di Desa Perkebunan Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 15 (2022): 385-394, doi:10.5281/zenodo.7049684.

masyarakat. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat, dan perspektif ekonomi Islam. Perbedaannya, penelitian Hanif, Mardhiyah Hayati, dan Desma Susilawati berfokus pada kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi pengeluaran Desa Kurungan Nyawa, meliputi perencanaan, alokasi, realisasi, dan manfaat program dalam mendukung pencapaian SDGs Desa berdasarkan perspektif maqashid syariah secara komprehensif, transparan, partisipatif, dan berkelanjutan bagi masyarakat desa sesuai kondisi sosial dan kebutuhan pembangunan setempat.³⁷

2. Reni Febriani dan Suryadi Samudra, artikel berjudul “Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa sebagai Upaya Menuju Kemandirian Desa Kotarindau,” mengkaji proses penerapan SDGs Desa dalam mendorong kemandirian desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan penelusuran informasi pemerintah desa. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan SDGs Desa di Desa Kotarindau dilakukan melalui perencanaan pembangunan yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan

³⁷ Hanif, Mardhiyah Hayati, dan Desma Susilawati, “Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” *SALAM: Islamic Economics Journal* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24042/slm.v1i1.7023>.

bahwa program pembangunan telah diarahkan pada kebutuhan masyarakat, tetapi keberhasilan implementasi tetap bergantung pada koordinasi, partisipasi, dan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola program. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada fokus terhadap SDGs Desa dan penggunaan pendekatan kualitatif untuk membaca praktik pembangunan di tingkat desa. Keduanya juga menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting. Perbedaannya, penelitian Febriani dan Samudra menekankan kemandirian desa sebagai hasil pelaksanaan SDGs, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada hubungan antara pengeluaran desa dan sasaran SDGs Desa, sehingga aspek APBDes, belanja, realisasi, serta manfaat anggaran menjadi pusat pembahasan. Kajian tersebut membantu menunjukkan bahwa SDGs Desa memerlukan dukungan belanja yang terukur, bukan sekadar narasi pembangunan, sehingga penelitian ini dapat menilai apakah anggaran desa benar-benar diterjemahkan menjadi program yang memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Bagian ini membantu memperjelas posisi penelitian baru terhadap kajian sebelumnya yang lebih umum.³⁸

3. Ahmad Subekti, artikel berjudul “The Analysis of Village Fund Contribution to Achieve a National Sustainable Development Goal (SDGs Village) in Gadingrejo Village, Kepil Subdistrict, Wonosobo Regency,” meneliti

³⁸ Reni Febriani dan Suryadi Samudra, “Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa sebagai Upaya Menuju Kemandirian Desa Kotarindau,” *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023): 337-344.

kontribusi Dana Desa terhadap pencapaian SDGs Desa. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui telaah kebijakan, dokumentasi, dan analisis terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki peran penting dalam mendukung enam dimensi SDGs Desa, antara lain kesejahteraan masyarakat, kemakmuran ekonomi, keseimbangan lingkungan, dan tata kelola. Namun, kontribusi tersebut belum merata karena perencanaan dan penggunaan dana masih menghadapi keterbatasan kapasitas serta koordinasi. Persamaan penelitian Subekti dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji peran sumber keuangan desa dalam pencapaian SDGs Desa dan menggunakan desa sebagai unit analisis. Keduanya melihat bahwa anggaran desa perlu diarahkan untuk menghasilkan manfaat pembangunan berkelanjutan. Perbedaannya, penelitian Subekti menitikberatkan kontribusi Dana Desa secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi pengeluaran desa secara lebih spesifik, termasuk proses perencanaan belanja, pelaksanaan kegiatan, kendala, dan kesesuaian pengeluaran dengan kebutuhan masyarakat Desa Kurungan Nyawa. Keterangan tersebut relevan untuk menempatkan pengeluaran desa sebagai variabel operasional, sebab keberhasilan SDGs Desa sangat ditentukan oleh kemampuan desa menyusun prioritas, membiayai program utama, dan memastikan setiap

kegiatan memberi manfaat berkelanjutan bagi warga desa secara kontekstual.³⁹

4. Firda Tari Triani, artikel berjudul “Efektivitas Kebijakan Sustainable Development Goals Desa, Tujuan: Desa Tanpa Kemiskinan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Ciamis,” membahas efektivitas pelaksanaan salah satu tujuan SDGs Desa, yaitu desa tanpa kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Informan penelitian meliputi unsur DPMD, bidang pemerintahan desa, pendamping desa, dan kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan SDGs Desa belum berjalan maksimal karena masih terdapat kendala pada sumber daya manusia, sosialisasi, ketersediaan data, serta pemahaman pelaksana kebijakan. Persamaan penelitian Triani dengan penelitian ini terletak pada kajian tentang implementasi SDGs Desa dan penggunaan metode kualitatif untuk memahami masalah pembangunan desa. Keduanya juga menekankan pentingnya perangkat desa dan kebijakan lokal dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Perbedaannya, penelitian Triani hanya berfokus pada tujuan desa tanpa kemiskinan, sedangkan penelitian ini membahas pengeluaran desa secara lebih luas dan

³⁹ Ahmad Subekti, “The Analysis of Village Fund Contribution to Achieve a National Sustainable Development Goal (SDGs Village) in Gadingrejo Village, Kepil Subdistrict, Wonosobo Regency,” *International Journal of Social Science* 1, no. 5 (2022): 739-746, <https://doi.org/10.53625/ijss.v1i5.1318>.

menghubungkannya dengan beberapa tujuan SDGs Desa yang relevan dengan kondisi Desa Kurungan Nyawa. Kondisi tersebut menjadi pijakan bahwa penelitian ini perlu melihat bukan hanya capaian administratif, melainkan juga bagaimana belanja desa diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki layanan dasar, dan memperkuat kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dukungan langsung pada konteks desa yang diteliti saat ini secara mendalam.⁴⁰

5. Nyimas Nadya Izana, Anik Susanti, dan Bai'aturohani, artikel berjudul "Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in Antosari Village, West Selamadeg, Tabanan, Bali," membahas pelaksanaan delapan belas indikator SDGs Desa di Desa Antosari. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa Desa Antosari telah melakukan berbagai inisiatif, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, penguatan layanan sosial, serta perhatian terhadap pelestarian lingkungan. Namun, pelaksanaan SDGs Desa tetap menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, kebutuhan koordinasi, dan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan

⁴⁰ Firda Tari Triani, "Efektivitas Kebijakan Sustainable Development Goals Desa, Tujuan: Desa Tanpa Kemiskinan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Ciamis," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 11, no. 2 (2024).

penelitian ini terletak pada penggunaan indikator SDGs Desa sebagai kerangka untuk menilai pembangunan desa. Keduanya juga mengkaji realitas implementasi di desa melalui pendekatan kualitatif. Perbedaannya, penelitian Izana, Susanti, dan Bai'aturohani menilai implementasi SDGs Desa pada keseluruhan program desa, sedangkan penelitian ini lebih menekankan bagaimana pengeluaran Desa Kurungan Nyawa, melalui alokasi dan realisasi anggaran, mampu mendukung pencapaian tujuan SDGs Desa secara terarah dan sesuai kebutuhan lokal. Dengan demikian, penelitian tersebut memberi gambaran bahwa keberlanjutan desa membutuhkan integrasi antara program fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini memanfaatkan pelajaran itu untuk menilai apakah pengeluaran desa telah tersusun secara seimbang pada konteks desa yang diteliti saat ini secara mendalam.⁴¹

6. Aryani dan Nurhazana, artikel berjudul “Analisis Strategi Pemerintah Desa dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Kecamatan Rupat,” menganalisis strategi pemerintah desa dalam mencapai tujuan SDGs Desa pada Desa Teluk Lecah dan Desa Pancur Jaya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menelaah strategi penyesuaian program pembangunan, hambatan pelaksanaan, serta rekomendasi

⁴¹ Nyimas Nadya Izana, Anik Susanti, dan Bai'aturohani, “Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in Antosari Village, West Selamadeg, Tabanan, Bali,” *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 5, no. 2 (2024): 209-218, <https://doi.org/10.15408/jisi.v5i2.40471>.

kebijakan bagi pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi desa diarahkan pada peningkatan infrastruktur, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan partisipasi masyarakat, tetapi masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran, data, dan sumber daya manusia. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada fokus terhadap strategi dan praktik pencapaian SDGs Desa di tingkat pemerintahan desa. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dan melihat pentingnya peran aparatur desa dalam menentukan prioritas pembangunan. Perbedaannya, penelitian Aryani dan Nurhazana membahas strategi pemerintah desa secara umum, sedangkan penelitian ini meneliti implementasi pengeluaran desa sebagai instrumen nyata untuk menilai apakah program yang dibiayai oleh APBDes telah selaras dengan tujuan SDGs Desa Kurungan Nyawa. Temuan tersebut memperkuat pentingnya melihat anggaran sebagai bagian dari strategi, karena setiap belanja desa seharusnya menggambarkan pilihan prioritas pemerintah desa. Karena itu, penelitian ini menilai kesesuaian strategi dengan realisasi pengeluaran di Desa Kurungan Nyawa secara langsung dan lebih terukur.⁴²

7. Mujalli dan Moh. Syarif, artikel berjudul “Model Pengelolaan Dana Desa Berbasis Sustainable Development Goals (SDG’s) Desa,” membahas model pengelolaan Dana

⁴² Aryani dan Nurhazana, “Analisis Strategi Pemerintah Desa dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Kecamatan Rupat,” *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan* 5, no. 2 (2024): 136-149, <https://doi.org/10.35314/iakp.v5.i2.325>.

Desa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Desa Rongdalem. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menilai proses perencanaan, pelaksanaan, serta hasil pengelolaan Dana Desa dalam kerangka SDGs Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah diarahkan pada pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan sosial, tetapi masih membutuhkan penguatan transparansi, partisipasi, dan pemahaman masyarakat tentang tujuan SDGs Desa. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada perhatian terhadap pengelolaan dana desa dan keterkaitannya dengan pencapaian SDGs Desa. Keduanya juga memandang anggaran desa sebagai alat penting untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan. Perbedaananya, penelitian Mujalli dan Syarif merumuskan model pengelolaan Dana Desa berbasis SDGs secara umum, sedangkan penelitian ini membatasi kajian pada implementasi pengeluaran Desa Kurungan Nyawa, terutama pada kesesuaian alokasi belanja, realisasi kegiatan, serta manfaatnya bagi masyarakat berdasarkan tujuan SDGs Desa. Penelitian tersebut menjadi pembanding karena sama-sama membicarakan relasi antara Dana Desa dan SDGs Desa. Namun, kajian ini menambahkan perhatian pada praktik pengeluaran sebagai bukti operasional mengenai bagaimana belanja direncanakan, dijalankan, dan dirasakan

masyarakat, terutama pada konteks APBDes dan manfaat pembangunan lokal secara lebih mendalam.⁴³

8. Maria Yunita Kosat, Fransiskus Marlon Reu, dan Agnes Kidi Bida Mudamakin, artikel berjudul “Pengaruh Perencanaan, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Potensi Pencapaian Tujuan SDGs Desa,” meneliti hubungan tata kelola Dana Desa dengan pencapaian SDGs Desa di Desa Naiola Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda berbantuan SPSS. Sampel penelitian berjumlah enam puluh responden yang dipilih secara purposive, meliputi perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap potensi pencapaian SDGs Desa, sedangkan transparansi tidak selalu berpengaruh signifikan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai Dana Desa, tata kelola keuangan, dan pencapaian SDGs Desa. Keduanya menempatkan perencanaan serta akuntabilitas sebagai unsur penting dalam keberhasilan pembangunan desa. Perbedaannya, penelitian Kosat, Reu, dan Mudamakin menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh variabel, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami implementasi pengeluaran desa secara mendalam, termasuk proses, hambatan, dan makna

⁴³ Mujalli dan Moh. Syarif, “Model Pengelolaan Dana Desa Berbasis Sustainable Development Goals (SDG’s) Desa,” *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2024): 1-12, <https://doi.org/10.56998/jr.v7i01.72>.

belanja desa bagi pencapaian SDGs Desa Kurungan Nyawa. Hasil tersebut penting bagi penelitian ini karena menunjukkan bahwa kualitas tata kelola memengaruhi arah manfaat Dana Desa. Oleh sebab itu, kajian ini melihat data, perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari implementasi pengeluaran desa secara nyata bagi masyarakat desa.⁴⁴

9. Gaudensius Suni, artikel berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Mendukung Program Pemerintah Berbasis Sustainable Development Goals pada Desa Haumeni Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara,” membahas akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam mendukung program pemerintah berbasis SDGs. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta dukungan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa masih menghadapi masalah pada kualitas administrasi, pemahaman aparat, partisipasi masyarakat, dan konsistensi pelaporan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap pengelolaan Dana Desa sebagai sarana mendukung SDGs Desa. Keduanya juga melihat akuntabilitas sebagai syarat

⁴⁴ Maria Yunita Kosat, Fransiskus Marlon Reu, dan Agnes Kidi Beda Mudamakin, “Pengaruh Perencanaan, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Potensi Pencapaian Tujuan SDGs Desa (Studi Kasus di Desa Naiola Timur),” *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 9, no. 4 (2025): 3217-3231, <https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2809>.

penting agar anggaran desa menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Perbedaananya, penelitian Suni lebih menekankan aspek pertanggungjawaban keuangan desa, sedangkan penelitian ini lebih luas karena menganalisis implementasi pengeluaran desa mulai dari perencanaan, alokasi, realisasi, sampai keterkaitannya dengan sasaran SDGs Desa di Desa Kurungan Nyawa. Kajian tersebut membantu menegaskan bahwa akuntabilitas bukan hanya kewajiban laporan, tetapi juga sarana memastikan dana benar-benar sampai pada program prioritas. Penelitian ini memakai sudut itu untuk membaca manfaat dan hambatan pengeluaran desa. Aspek ini menjadi batas analisis agar kajian lebih terarah pada hubungan anggaran dan hasil pembangunan.⁴⁵

10. B. Hari Saptaning Tyas, Condrodewi Puspitasari, dan Pius Suban Ballol, artikel berjudul “Model Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa dalam Akselerasi Sustainable Development Goals Desa,” membahas penyusunan model perencanaan dan penganggaran Dana Desa untuk mempercepat pencapaian SDGs Desa di Sumbermulyo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan Focus Group Discussion. Penelitian ini menilai hubungan antara mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan capaian

⁴⁵ Gaudensius Suni, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Mendukung Program Pemerintah Berbasis Sustainable Development Goals pada Desa Haumeni Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 16, no. 2 (2025), <http://dx.doi.org/10.36448/jak.v16i2.4493>.

pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akselerasi SDGs Desa membutuhkan integrasi data, kesesuaian prioritas pembangunan, keterlibatan masyarakat, dan penyusunan anggaran yang selaras dengan kebutuhan desa. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada perhatian terhadap perencanaan dan penganggaran desa dalam mendukung SDGs Desa. Keduanya juga menempatkan Dana Desa sebagai instrumen strategis untuk pembangunan berkelanjutan. Perbedaannya, penelitian Tyas, Puspitasari, dan Ballol berfokus pada model perencanaan dan penganggaran, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi pengeluaran desa pada tahap pelaksanaan dan realisasi program, sehingga lebih diarahkan pada keterhubungan antara belanja Desa Kurungan Nyawa dan pencapaian SDGs Desa. Temuan itu memberi dasar bahwa perencanaan dan penganggaran harus diikuti pelaksanaan yang konsisten. Penelitian ini karenanya memusatkan analisis pada jembatan antara dokumen APBDes, kegiatan yang dilaksanakan, dan kontribusinya terhadap SDGs Desa dalam praktik pemerintahan desa setempat secara lebih mendalam dan terukur.⁴⁶

⁴⁶ B. Hari Saptaning Tyas, Condrodewi Puspitasari, dan Pius Suban Ballol, "Model Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa dalam Akselerasi Sustainable Development Goals Desa," *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 13, no. 1 (2025): 1-18, <https://doi.org/10.34010/xqze9n83>.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan, pilihan tindakan, dan instrumen pemerintah yang diarahkan untuk menyelesaikan masalah publik. Dalam konteks desa, kebijakan publik tidak hanya hadir dalam bentuk peraturan nasional, tetapi juga dalam bentuk perencanaan desa, penetapan APBDes, serta program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Teori kebijakan publik penting digunakan karena penelitian ini menempatkan pengeluaran desa sebagai hasil dari proses kebijakan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat, perumusan prioritas, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, sampai evaluasi manfaatnya. Dengan demikian, pengeluaran desa bukan tindakan administratif yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian kebijakan publik yang harus diarahkan pada tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁷

Dalam perspektif kebijakan publik, pemerintah memiliki peran untuk memilih masalah yang dianggap penting, menetapkan tujuan, menentukan instrumen, dan mengalokasikan sumber daya. Pilihan tersebut selalu melibatkan pertimbangan nilai, kepentingan, kapasitas kelembagaan, serta kondisi sosial masyarakat. Pada tingkat desa, proses ini terlihat dalam musyawarah desa, penyusunan RPJMDes, RKPDDes, dan

⁴⁷ William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, 6th ed. (New York: Routledge, 2018); Michael Hill dan Peter Hupe, *Implementing Public Policy*, 4th ed. (London: Sage, 2022).

APBDes. Kebijakan pengeluaran desa harus menjawab kebutuhan dasar warga, memperhatikan kelompok rentan, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, analisis kebijakan publik membantu peneliti memahami mengapa suatu program desa dipilih, bagaimana keputusan penganggaran dibuat, siapa yang terlibat, dan apakah kebijakan tersebut menghasilkan perubahan yang sesuai dengan tujuan pembangunan.⁴⁸

Salah satu pendekatan yang relevan untuk penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Teori ini menekankan empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut sesuai untuk melihat pelaksanaan pengeluaran desa karena program yang telah tertulis dalam APBDes tidak otomatis berhasil apabila aparat desa tidak memahami tujuan program, sumber daya tidak memadai, pelaksana tidak memiliki komitmen, atau prosedur birokrasi menghambat pelaksanaan. Dalam penelitian tentang SDGs Desa, teori ini dapat dipakai untuk menilai apakah pengeluaran yang direncanakan benar-benar diterjemahkan menjadi kegiatan yang tepat sasaran.⁴⁹

Kebijakan publik juga dapat dilihat sebagai proses yang bersiklus. Siklus kebijakan meliputi perumusan masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pengambilan

⁴⁸ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, 16th ed. (New York: Pearson, 2021); B. Guy Peters, *Advanced Introduction to Public Policy*, 2nd ed. (Cheltenham: Edward Elgar, 2021).

⁴⁹ George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980); Soren C. Winter, "Implementation Perspectives: Status and Reconsideration," dalam *Handbook of Public Administration*, ed. B. Guy Peters dan Jon Pierre (London: Sage, 2022).

keputusan, implementasi, evaluasi, dan umpan balik. Dalam pemerintahan desa, siklus tersebut tercermin pada tahapan perencanaan pembangunan desa, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa keberhasilan pengeluaran desa untuk mendukung SDGs Desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kualitas proses kebijakan sejak awal. Apabila perumusan masalah lemah, data desa tidak akurat, atau partisipasi masyarakat rendah, maka program yang dibiayai desa berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan warga.⁵⁰

Teori kebijakan publik menegaskan bahwa kebijakan tidak bekerja dalam ruang kosong. Kebijakan selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik, budaya, dan kelembagaan. Desa Kurungan Nyawa sebagai lokasi penelitian memiliki karakter lokal yang perlu dipahami, seperti kondisi masyarakat, struktur pemerintahan desa, potensi ekonomi, masalah layanan dasar, dan orientasi pembangunan. Dalam konteks ini, kebijakan pengeluaran desa perlu dilihat sebagai praktik pemerintahan lokal yang dipengaruhi oleh regulasi pusat, arahan pemerintah daerah, kemampuan aparatur, serta aspirasi masyarakat. Analisis kebijakan publik membantu menilai sejauh mana pemerintah desa mampu menerjemahkan agenda pembangunan berkelanjutan ke dalam program yang realistis dan sesuai kondisi lokal.⁵¹

⁵⁰ Christopher M. Weible dan Paul A. Sabatier, *Theories of the Policy Process*, 5th ed. (New York: Routledge, 2023); Michael Howlett, *Designing Public Policies*, 2nd ed. (London: Routledge, 2019).

⁵¹ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, dan Etika Kebijakan Publik* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021); Eko Prasjo dan Teguh Kurniawan, "Reformasi

Kebijakan publik di tingkat desa juga berkaitan erat dengan prinsip partisipasi. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting karena warga merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan dan masalah di lingkungannya. Musyawarah desa seharusnya menjadi ruang untuk menentukan prioritas belanja secara deliberatif, bukan hanya formalitas administratif. Jika masyarakat dilibatkan sejak perencanaan, maka pengeluaran desa lebih berpeluang menyasar kebutuhan nyata, seperti infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, ekonomi produktif, sanitasi, dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, teori kebijakan publik memberikan dasar bahwa legitimasi pengeluaran desa tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga oleh keterlibatan warga dan manfaat publik yang dihasilkan.⁵²

Dalam implementasi kebijakan, kapasitas organisasi menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Kapasitas tersebut mencakup kemampuan aparatur, ketersediaan data, sistem administrasi, koordinasi antaraktor, serta mekanisme pengawasan. Pada tingkat desa, keterbatasan kapasitas sering menjadi hambatan dalam menyusun program berbasis indikator SDGs Desa. Pemerintah desa mungkin memiliki anggaran, tetapi belum tentu memiliki kemampuan teknis untuk mengaitkan setiap belanja dengan target pembangunan berkelanjutan. Karena itu, teori implementasi kebijakan menjadi landasan untuk menguji apakah struktur

Birokrasi dan Kebijakan Publik di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 19, no. 2 (2022): 113-128.

⁵² Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022); Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, ed. revisi (Bandung: Alfabeta, 2022).

pemerintahan desa dan perangkat pendukungnya mampu menjalankan kebijakan pengeluaran secara efektif.⁵³

Selain aspek teknis, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh disposisi atau sikap pelaksana. Komitmen kepala desa, perangkat desa, BPD, dan pelaksana kegiatan menjadi penentu apakah anggaran digunakan sesuai tujuan. Disposisi yang baik ditunjukkan melalui integritas, kesungguhan menjalankan program, keterbukaan terhadap aspirasi warga, serta orientasi pada hasil. Sebaliknya, disposisi yang lemah dapat menyebabkan program hanya mengejar serapan anggaran, tidak memperhatikan manfaat, atau kurang transparan dalam pelaporan. Penelitian ini memandang pengeluaran desa sebagai kebijakan yang harus dianalisis dari sisi perilaku pelaksana, bukan semata dari angka dalam dokumen anggaran.⁵⁴

Kebijakan publik yang baik harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Dalam penelitian ini, SDGs Desa menjadi rujukan normatif dan analitis untuk menilai arah kebijakan pengeluaran desa. Artinya, belanja desa perlu dikaitkan dengan indikator pembangunan seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan, air bersih, permukiman layak, ekonomi lokal, lingkungan, dan kelembagaan desa. Dengan memakai teori kebijakan publik, peneliti dapat melihat hubungan antara tujuan kebijakan, instrumen anggaran, proses

⁵³ Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World* (Princeton: Princeton University Press, 2017); Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2021).

⁵⁴ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2021); Frank Fischer, Gerald J. Miller, dan Mara S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis* (Boca Raton: CRC Press, 2022).

implementasi, serta dampak yang dirasakan masyarakat. Kerangka ini membuat kajian tidak berhenti pada deskripsi program, tetapi sampai pada penilaian keterhubungan antara kebijakan dan hasil pembangunan.⁵⁵

Dalam studi administrasi publik kontemporer, kebijakan publik juga menuntut akuntabilitas dan evaluasi. Akuntabilitas menunjukkan bahwa setiap keputusan penggunaan dana publik harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan, sedangkan evaluasi membantu melihat apakah program membawa manfaat yang diharapkan. Pada pemerintahan desa, akuntabilitas pengeluaran dapat dilihat dari dokumen perencanaan, laporan realisasi, papan informasi, musyawarah pertanggungjawaban, serta akses masyarakat terhadap informasi. Teori kebijakan publik memberi ruang untuk menilai apakah praktik pengeluaran desa di Kurungan Nyawa telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung SDGs Desa.⁵⁶

Berdasarkan uraian tersebut, teori kebijakan publik dalam penelitian ini berfungsi sebagai *grand theory*. Teori ini menjelaskan bahwa pengeluaran desa merupakan hasil dari pilihan kebijakan, proses implementasi, dan mekanisme evaluasi yang harus diarahkan pada kepentingan publik. Melalui teori ini, penelitian dapat menganalisis hubungan antara regulasi, perencanaan desa, pelaksanaan APBDes, peran aparatur,

⁵⁵ Stephen P. Osborne, *Public Service Logic: Creating Value for Public Service Users, Citizens, and Society through Public Service Delivery* (London: Routledge, 2021); Mark Bovens, Robert E. Goodin, dan Thomas Schillemans, *The Oxford Handbook of Public Accountability* (Oxford: Oxford University Press, 2022).

⁵⁶ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022); Frank Fischer dan Herbert Gottweis, *The Argumentative Turn Revisited* (Durham: Duke University Press, 2022).

partisipasi masyarakat, serta capaian SDGs Desa. Dengan demikian, kajian mengenai pengeluaran desa tidak dipahami sebagai kajian akuntansi anggaran semata, tetapi sebagai analisis kebijakan publik yang menilai efektivitas pemerintah desa dalam mengelola sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan dan kemaslahatan masyarakat.⁵⁷

Selain teori Edward III, pendekatan kelembagaan juga penting untuk membaca kebijakan desa. Kelembagaan menentukan aturan main, pembagian peran, mekanisme koordinasi, dan pola hubungan antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat. Dalam pelaksanaan pengeluaran desa, kelembagaan yang kuat dapat mengurangi ketidakjelasan kewenangan dan mempercepat penyelesaian masalah. Sebaliknya, kelembagaan yang lemah dapat membuat program berjalan sektoral, administrasi terlambat, dan pertanggungjawaban tidak optimal. Oleh karena itu, implementasi pengeluaran desa perlu dilihat sebagai hasil kerja institusi lokal yang dipengaruhi oleh aturan formal dan kebiasaan sosial masyarakat.⁵⁸

Kebijakan publik juga menekankan pentingnya analisis aktor. Setiap kebijakan melibatkan pihak yang memiliki kepentingan, sumber daya, dan pengaruh berbeda. Pada tingkat desa, aktor tersebut meliputi kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, kelompok pemuda,

⁵⁷ Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2021); Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2022).

⁵⁸ Elinor Ostrom, *Understanding Institutional Diversity* (Princeton: Princeton University Press, 2022); Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy* (Lanham: University Press of America, 2021).

pendamping desa, pemerintah daerah, dan warga penerima manfaat. Hubungan antaraktor dapat mendorong atau menghambat pelaksanaan pengeluaran desa. Jika koordinasi baik, program lebih mudah diarahkan pada kebutuhan publik. Jika koordinasi lemah, program dapat menjadi formalitas dan kurang memberi dampak.⁵⁹

Dalam formulasi kebijakan, masalah publik harus dirumuskan secara tepat. Kesalahan merumuskan masalah dapat menyebabkan kesalahan memilih program dan alokasi anggaran. Misalnya, persoalan kemiskinan tidak cukup dijawab dengan bantuan sesaat apabila akar masalahnya adalah kurangnya pekerjaan, rendahnya keterampilan, atau akses pasar yang terbatas. Karena itu, teori kebijakan publik menuntut pemerintah desa memakai data dan dialog warga dalam menentukan prioritas. Pendekatan ini penting bagi penelitian karena pengeluaran desa akan dinilai dari kesesuaiannya dengan masalah pembangunan yang ingin dipecahkan.⁶⁰

Teori kebijakan publik modern juga menempatkan inovasi dan digitalisasi sebagai bagian dari peningkatan tata kelola. Aplikasi keuangan desa, sistem informasi desa, dan pendataan SDGs Desa dapat memperbaiki transparansi, akurasi data, serta efisiensi administrasi. Namun, teknologi hanya efektif apabila didukung sumber daya manusia dan budaya kerja yang terbuka. Dalam konteks pengeluaran desa, digitalisasi dapat membantu

⁵⁹ Hamdi Muchlis, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2022); Anggara Sahya, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2022).

⁶⁰ James Anderson, *Public Policymaking*, 9th ed. (Boston: Cengage, 2022); Paul Cairney, *Understanding Public Policy*, 2nd ed. (London: Red Globe Press, 2020).

pencatatan dan pelaporan, tetapi penentuan prioritas tetap memerlukan partisipasi warga. Oleh karena itu, aspek teknologi perlu dibaca sebagai pendukung implementasi, bukan pengganti deliberasi publik.⁶¹

Dengan memperhatikan berbagai pendekatan tersebut, teori kebijakan publik memberi dasar yang luas untuk memahami pelaksanaan pengeluaran desa. Teori ini membantu penelitian menilai apakah kebijakan desa telah dirumuskan berdasarkan masalah, dilaksanakan melalui organisasi yang mampu, melibatkan aktor yang relevan, dan dievaluasi berdasarkan manfaat. Kerangka ini menjadi penting karena SDGs Desa bukan hanya target teknis, tetapi tujuan kebijakan publik yang membutuhkan proses implementasi yang konsisten. Oleh sebab itu, teori kebijakan publik menjadi landasan awal dalam BAB II.⁶²

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan publik akhirnya dipahami sebagai proses yang menghubungkan norma, sumber daya, aktor, dan hasil pembangunan. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menentukan pilihan belanja, tetapi pilihan tersebut harus dibatasi oleh aturan, kebutuhan warga, dan tujuan keberlanjutan. Oleh karena itu, teori kebijakan publik membantu membangun pertanyaan penelitian tentang bagaimana program dipilih, bagaimana anggaran dijalankan, serta bagaimana manfaatnya dapat ditelusuri. Pendekatan ini menjadi dasar untuk

⁶¹ Kettl Donald F., *The Politics of the Administrative Process*, 8th ed. (Washington DC: CQ Press, 2023); Helen Margetts dan Perri 6, "Digital Era Governance," *Public Administration* 100, no. 1 (2022): 3-20.

⁶² Wahab Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021); Dwiyanto Agus, *Manajemen Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022).

menghubungkan APBDes dengan SDGs Desa Kurungan Nyawa.⁶³

B. Pengeluaran Desa

Pengelolaan dana publik perlu diarahkan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, serta akuntabilitas program. Kajian Nurlaili menunjukkan bahwa program ekonomi Islam yang dikelola secara terarah dapat mendukung pengurangan kemiskinan; prinsip tersebut relevan untuk menilai prioritas pengeluaran desa.¹

Pengeluaran desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang berhubungan dengan penggunaan dana publik untuk membiayai kewenangan desa. Dalam struktur APBDes, pengeluaran desa terutama tampak pada belanja desa, yaitu semua pengeluaran yang menjadi kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diterima kembali oleh desa. Belanja tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan mendesak. Dengan demikian, pengeluaran desa merupakan instrumen utama pemerintah desa untuk menerjemahkan rencana pembangunan menjadi kegiatan nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat.⁶⁴

⁶³ Ari Subowo, “Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Implementasi Kebijakan Publik,” *Jurnal Administrasi Negara* 12, no. 2 (2024): 100-116; Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan dan Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Kanisius, 2022).

⁶⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022).

Secara konseptual, pengeluaran desa dapat dianalisis melalui teori pengeluaran publik. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan anggaran untuk menyediakan barang publik, memperbaiki kegagalan pasar, memperluas akses pelayanan dasar, dan meningkatkan kesejahteraan. Desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki posisi strategis karena dapat mengenali kebutuhan warga secara lebih langsung. Belanja desa idealnya diarahkan pada kegiatan yang tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kualitas hidup, kapasitas ekonomi, dan kohesi sosial masyarakat. Oleh sebab itu, pengeluaran desa harus dipandang sebagai investasi sosial yang memberi dampak jangka panjang.⁶⁵

Dalam praktik pemerintahan desa, pengeluaran tidak dapat dilepaskan dari siklus perencanaan dan penganggaran. RPJMDes menjadi dokumen perencanaan enam tahunan, RKPDes menjadi rencana tahunan, sedangkan APBDes menjadi instrumen keuangan yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Keterhubungan ketiga dokumen tersebut menentukan kualitas pengeluaran desa. Apabila belanja yang tercantum dalam APBDes tidak berangkat dari masalah dan prioritas yang tertulis dalam perencanaan, maka anggaran berpotensi tidak efektif. Karena itu, penelitian ini menilai pengeluaran desa bukan hanya

⁶⁵ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2022); Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2021).

berdasarkan realisasi, tetapi juga konsistensinya dengan proses perencanaan pembangunan desa.⁶⁶

Pengeluaran desa memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Dari sisi ekonomi, belanja desa dapat mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur, penguatan usaha masyarakat, dan kegiatan produktif. Dari sisi sosial, belanja desa dapat meningkatkan akses layanan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Dari sisi kelembagaan, pengeluaran desa dapat memperkuat tata kelola, administrasi, dan kapasitas perangkat desa. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa APBDes bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi alat pemerintah desa untuk mengarahkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.⁶⁷

Pengelolaan pengeluaran desa harus mengikuti asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Transparansi menuntut pemerintah desa membuka informasi penggunaan anggaran kepada masyarakat. Akuntabilitas menuntut setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan moral. Partisipasi menempatkan masyarakat sebagai pihak yang berhak memberi masukan dan mengawasi. Tertib anggaran memastikan bahwa pengeluaran dilakukan sesuai prosedur dan jadwal yang

⁶⁶ Muhammad Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: BPFE, 2022); Bastian Indra, *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2022).

⁶⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa* (Jakarta: Kemenkeu, 2023); Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Kebijakan Dana Desa Tahun 2024* (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2024).

ditetapkan. Asas-asas tersebut penting dalam penelitian ini karena keberhasilan belanja desa untuk SDGs Desa tidak hanya ditentukan oleh program, tetapi juga oleh cara anggaran dikelola.⁶⁸

Dalam beberapa studi, pengeluaran desa sering menghadapi persoalan teknis dan substantif. Persoalan teknis dapat berupa keterlambatan laporan, lemahnya administrasi, kurangnya kapasitas aparatur, atau penggunaan aplikasi keuangan yang belum optimal. Persoalan substantif dapat berupa rendahnya partisipasi masyarakat, dominasi elite dalam penentuan prioritas, kurangnya keterkaitan program dengan data kebutuhan, serta lemahnya evaluasi hasil. Kondisi tersebut dapat menyebabkan belanja desa lebih berorientasi pada penyerapan anggaran daripada capaian pembangunan. Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi pengeluaran desa perlu mengkaji faktor penghambat agar rekomendasi perbaikan lebih tepat.⁶⁹

Pengeluaran desa juga perlu dianalisis berdasarkan ketepatan sasaran. Ketepatan sasaran berarti belanja desa diarahkan kepada masalah yang benar-benar dihadapi masyarakat dan memberi manfaat kepada kelompok penerima yang sesuai. Dalam konteks SDGs Desa, ketepatan sasaran dapat dilihat dari apakah anggaran mendukung desa tanpa kemiskinan, desa sehat dan sejahtera,

⁶⁸ Sumiati, "Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa," *Jurnal MODERAT* 4, no. 4 (2018): 121-135; Johantri, "Implementasi Asas Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Education and Development* 12, no. 3 (2024): 265-273.

⁶⁹ Rini Febrianti, "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDes," *Jurnal Sains Riset* 14, no. 1 (2024): 88-96; Alfiaul Faizah dan Retnosari, "Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa," *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 56-68.

pendidikan berkualitas, air bersih dan sanitasi, pertumbuhan ekonomi merata, serta kelembagaan desa yang kuat. Pengeluaran yang besar tidak selalu menunjukkan keberhasilan apabila tidak menyentuh kelompok rentan atau tidak menghasilkan perubahan kondisi masyarakat.⁷⁰

Dari sisi pengawasan, pengeluaran desa harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme internal dan eksternal. Pemerintah desa bertanggung jawab menyusun laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban, sementara BPD, pemerintah daerah, inspektorat, dan masyarakat memiliki fungsi pengawasan. Pengawasan penting untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai peruntukan dan mencegah penyimpangan. Pada saat yang sama, pengawasan juga seharusnya bersifat pembinaan, sehingga aparatur desa dapat memperbaiki kapasitasnya. Dalam penelitian ini, aspek pengawasan menjadi bagian dari analisis implementasi pengeluaran desa karena berhubungan langsung dengan akuntabilitas dan efektivitas program.⁷¹

Dalam pembangunan desa berkelanjutan, pengeluaran desa perlu berbasis data. Data sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan dapat membantu pemerintah desa menentukan prioritas belanja secara lebih objektif. Tanpa data yang memadai, anggaran dapat diarahkan pada kegiatan yang populer tetapi tidak

⁷⁰ Wahyu Hidayat dan Nurul Azizah, “Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat,” *Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan* 3, no. 2 (2022): 101-115; Putri Wulandari, “Akuntabilitas APBDes dalam Pembangunan Desa,” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 11, no. 1 (2023): 35-47.

⁷¹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Pedoman Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: BPKP, 2023); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

mendesak. SDGs Desa menyediakan kerangka tujuan dan indikator yang dapat dipakai untuk membaca kondisi desa. Karena itu, belanja desa seharusnya tidak hanya mengikuti kebiasaan tahun sebelumnya, tetapi menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan capaian indikator pembangunan. Hal ini menjadi dasar penting dalam menganalisis Desa Kurungan Nyawa.⁷²

Pengeluaran desa yang efektif harus mampu menciptakan nilai publik. Nilai publik tercipta ketika belanja desa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat, memperkuat kepercayaan kepada pemerintah desa, dan meningkatkan kualitas kehidupan kolektif. Misalnya, pembangunan drainase tidak hanya dilihat sebagai pekerjaan fisik, tetapi sebagai upaya mengurangi risiko banjir, menjaga kesehatan, dan membuat lingkungan permukiman lebih layak. Demikian pula kegiatan pemberdayaan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai pelatihan, tetapi sebagai proses memperluas kesempatan kerja dan pendapatan warga. Perspektif ini memperkuat hubungan antara pengeluaran desa dan SDGs Desa.⁷³

Dalam penelitian ini, pengeluaran desa didefinisikan secara operasional sebagai seluruh belanja yang dialokasikan dan direalisasikan Pemerintah Desa Kurungan Nyawa untuk

⁷² Dian Safitri dan Rachmad Hidayat, “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 21, no. 2 (2022): 145-160; Ratna Dewi, “Belanja Desa dan Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Administrasi Publik* 19, no. 2 (2023): 211-224.

⁷³ World Bank, *Village Public Expenditure Review in Indonesia* (Washington DC: World Bank, 2023); OECD, *Subnational Government Finance for Sustainable Development* (Paris: OECD Publishing, 2023).

membiayai program yang berhubungan dengan pembangunan, pemberdayaan, pelayanan, dan tata kelola desa. Analisis diarahkan pada bagaimana belanja tersebut direncanakan, dipilih, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan, dan dikaitkan dengan capaian SDGs Desa. Dengan definisi tersebut, penelitian tidak hanya menilai kepatuhan formal terhadap aturan keuangan desa, tetapi juga menilai kesesuaian antara penggunaan anggaran, kebutuhan masyarakat, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.⁷⁴

Pengeluaran desa harus dipahami dalam hubungan antara sumber pendapatan dan prioritas belanja. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan, serta pendapatan asli desa menjadi sumber yang menentukan kemampuan fiskal desa. Namun, kemampuan fiskal tidak otomatis menghasilkan pembangunan yang baik apabila tidak diikuti kualitas perencanaan dan pengendalian. Karena itu, analisis pengeluaran desa perlu melihat bagaimana pemerintah desa memilih program di tengah keterbatasan anggaran, menentukan prioritas, serta memastikan kegiatan memiliki manfaat yang jelas.⁷⁵

Kebijakan Dana Desa beberapa tahun terakhir menekankan penggunaan anggaran untuk pemulihan ekonomi, perlindungan sosial, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan

⁷⁴ Nurlaila dan Ahmad Yani, “Pengelolaan APBDes Berbasis Transparansi dan Akuntabilitas,” *Jurnal Akuntansi Publik* 8, no. 1 (2024): 1-17; Riska Amalia, “Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *Jurnal Governance* 4, no. 2 (2023): 75-91.

⁷⁵ Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

program prioritas sesuai kewenangan desa. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa pengeluaran desa harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus konsisten dengan agenda pembangunan nasional. Dalam konteks SDGs Desa, penggunaan dana harus dikaitkan dengan tujuan yang dapat diukur. Penelitian ini penting karena ingin mengetahui apakah pengeluaran Desa Kurungan Nyawa telah bergerak dari pola belanja administratif menuju belanja pembangunan yang berorientasi hasil.⁷⁶

Kualitas belanja desa dapat dilihat dari efisiensi, efektivitas, pemerataan, dan keberlanjutan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan biaya yang wajar, efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan, pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat, dan keberlanjutan berkaitan dengan daya guna program dalam jangka panjang. Keempat ukuran tersebut membantu peneliti menilai pengeluaran desa secara lebih mendalam. Belanja yang murah belum tentu efisien apabila kualitasnya rendah, sedangkan belanja yang selesai tepat waktu belum tentu efektif apabila tidak menjawab kebutuhan masyarakat.⁷⁷

Perencanaan pengeluaran desa berbasis kebutuhan masyarakat menjadi kunci agar APBDes tidak sekadar menyalin kegiatan tahun sebelumnya. Pemerintah desa perlu mengidentifikasi masalah melalui musyawarah, data SDGs Desa, dan evaluasi

⁷⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024; Kementerian Keuangan, Nota Keuangan APBN 2025 (Jakarta: Kemenkeu, 2024).

⁷⁷ Bambang Suryono dan Siti Aminah, "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 14, no. 2 (2023): 245-260; Dwi Ratmono, *Akuntansi Keuangan Desa* (Semarang: Undip Press, 2022).

program. Usulan masyarakat kemudian disaring berdasarkan kewenangan desa, kemampuan anggaran, dan tingkat urgensi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa pengeluaran desa benar-benar berkaitan dengan masalah publik. Tanpa perencanaan berbasis kebutuhan, belanja desa berisiko menjadi kegiatan rutin yang kurang berdampak terhadap pencapaian SDGs Desa.⁷⁸

Pengeluaran desa juga perlu diarahkan pada pemberdayaan, bukan hanya pembangunan fisik. Infrastruktur memang penting, tetapi masyarakat juga membutuhkan peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, penguatan kelembagaan ekonomi, dan akses informasi. Belanja pemberdayaan dapat memperkuat kemandirian warga dan mengurangi ketergantungan pada bantuan. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kombinasi antara infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi akan membuat manfaat pengeluaran lebih tahan lama. Oleh karena itu, penelitian ini memperhatikan proporsi dan arah belanja desa dalam mendukung pembangunan yang inklusif.⁷⁹

Akhirnya, pengeluaran desa harus dilihat dari sisi kontrol sosial. Masyarakat berhak mengetahui, memberi masukan, dan mengawasi penggunaan APBDes karena anggaran tersebut berasal dari dana publik. Kontrol sosial dapat dilakukan melalui

⁷⁸ Yuni Astuti dan Haris Munandar, "Dana Desa, Kapasitas Aparatur, dan Kualitas Belanja Desa," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 14, no. 1 (2023): 33-49; Siti Maryam, "Perencanaan APBDes Berbasis Kebutuhan Masyarakat," *Jurnal Administrasi Publik* 20, no. 1 (2024): 72-86.

⁷⁹ Agus Salim dan Nur Fitriani, "Belanja Desa dan Pencapaian Indikator Pembangunan Desa," *Jurnal Pembangunan Wilayah* 16, no. 2 (2024): 119-134; Sri Mulyani, "Efektivitas Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Desa* 5, no. 1 (2023): 15-30.

musyawarah, papan informasi, laporan terbuka, dan keterlibatan BPD. Semakin kuat kontrol sosial, semakin kecil peluang penyalahgunaan dan semakin besar kemungkinan anggaran digunakan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, analisis pengeluaran desa perlu mencakup aspek transparansi dan partisipasi sebagai bagian dari keberhasilan implementasi.⁸⁰

Belanja desa berbasis kinerja menjadi pendekatan yang penting dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut menuntut agar setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki keluaran dan manfaat yang dapat dijelaskan. Dalam praktiknya, pemerintah desa perlu menetapkan sasaran kegiatan, penerima manfaat, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi. Jika pendekatan berbasis kinerja diterapkan, pengeluaran desa tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi alat pencapaian target pembangunan. Oleh karena itu, pengeluaran Desa Kurungan Nyawa perlu dianalisis dari sisi keterhubungan antara input anggaran, proses implementasi, output program, dan kontribusi terhadap SDGs Desa.⁸¹

C. Sustainable Development Goals (SDGs) Desa

SDGs Desa adalah arah pembangunan desa berkelanjutan yang menerjemahkan tujuan pembangunan ke dalam kebutuhan, potensi, dan persoalan desa. Penelitian ini tidak menilai seluruh

⁸⁰ Fitrah Ramadhan, "Pengawasan Masyarakat terhadap APBDes," *Jurnal Governance and Local Politics* 6, no. 1 (2024): 40-55; Ahmad Mustofa, "Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Anggaran," *Jurnal Akuntansi Sektor Publik* 9, no. 2 (2023): 201-216.

⁸¹ Rohman Hidayat, "Analisis Belanja Desa Berbasis Kinerja," *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* 8, no. 2 (2024): 89-105; Erna Wati, "Evaluasi Pengeluaran Desa dalam Mendukung Pembangunan Lokal," *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 10, no. 1 (2023): 57-73.

tujuan SDGs Desa secara terpisah. Analisis dibatasi pada tujuan yang memiliki hubungan langsung dengan program pengeluaran Desa Kurungan Nyawa, yaitu: desa tanpa kemiskinan; desa sehat dan sejahtera; desa berpendidikan berkualitas; keterlibatan perempuan desa; desa berenergi bersih dan terbarukan; pertumbuhan ekonomi desa merata; desa tanpa kesenjangan; desa layak air bersih dan sanitasi; desa damai berkeadilan; serta kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Pemilihan indikator tersebut didasarkan pada kesesuaiannya dengan bidang belanja desa, dokumen APBDesa, dan bukti yang dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi.

2. Indikator Pengeluaran Desa dalam Perspektif Maqashid Syariah

Setiap program pengeluaran desa dianalisis berdasarkan kemaslahatan yang ditimbulkannya. Hifz al-din (perlindungan agama) dihubungkan dengan dukungan kegiatan keagamaan dan kerukunan; hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dengan kesehatan, bantuan sosial, air bersih, sanitasi, dan keselamatan; hifz al-aql (perlindungan akal) dengan pendidikan, literasi, dan peningkatan kapasitas; hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dengan perlindungan perempuan dan anak, gizi, serta lingkungan layak; dan hifz al-mal (perlindungan harta) dengan pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, pengelolaan aset, dan akuntabilitas anggaran.

Pencapaian SDGs menuntut integrasi antara kebijakan ekonomi, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan. Wulandari dan Salma

menegaskan bahwa ekonomi Islam, melalui orientasi keadilan sosial dan kemaslahatan, memiliki keterkaitan dengan upaya pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan pembiayaan pembangunan berkelanjutan.²

Sustainable Development Goals merupakan agenda pembangunan global yang disepakati untuk mengarahkan negara-negara pada pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Agenda ini menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menurunkan kemiskinan, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan, menjaga lingkungan, memperkuat perdamaian, serta membangun kemitraan. Dalam konteks Indonesia, SDGs tidak hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga perlu diturunkan sampai tingkat lokal karena sebagian besar persoalan pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah dan desa. Oleh sebab itu, SDGs Desa menjadi kerangka penting untuk melihat arah pembangunan desa.⁸²

SDGs Desa adalah pelokalan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam konteks desa. Pelokalan ini diperlukan karena desa memiliki karakteristik, potensi, dan masalah yang berbeda dengan wilayah perkotaan. SDGs Desa berfungsi sebagai arah kebijakan agar pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi juga pada kesejahteraan sosial, ekonomi lokal, kelestarian lingkungan, dan penguatan kelembagaan. Melalui

⁸² United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (New York: United Nations, 2015); Jeffrey D. Sachs et al., *Sustainable Development Report 2024* (Dublin: Dublin University Press, 2024).

SDGs Desa, pemerintah desa diarahkan untuk membuat perencanaan dan penganggaran yang lebih berbasis data. Karena itu, penelitian ini menggunakan SDGs Desa sebagai alat analisis untuk melihat apakah pengeluaran Desa Kurungan Nyawa telah berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan.⁸³

Secara substantif, SDGs Desa memuat 18 tujuan yang meliputi desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan permukiman aman dan nyaman, konsumsi dan produksi sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut dan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan pembangunan desa, serta kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Tujuan tersebut memperlihatkan cakupan pembangunan desa yang luas dan multidimensi.⁸⁴

Pencapaian SDGs Desa sangat bergantung pada kemampuan desa mengintegrasikan tujuan-tujuan tersebut ke dalam perencanaan dan penganggaran. Setiap kegiatan yang dibiayai desa idealnya dapat dikaitkan dengan satu atau beberapa tujuan SDGs Desa. Misalnya, belanja untuk sanitasi berkaitan dengan desa layak air

⁸³ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (Jakarta: Kemendesa PDTT, 2020); Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

⁸⁴ Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendesa PDTT Tahun 2020-2024; Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.

bersih dan sanitasi, belanja pemberdayaan ekonomi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi merata, dan belanja penguatan kelembagaan berkaitan dengan kelembagaan desa dinamis. Oleh sebab itu, SDGs Desa tidak hanya menjadi daftar tujuan normatif, tetapi menjadi pedoman praktis untuk menilai relevansi dan manfaat pengeluaran desa.⁸⁵

Data menjadi unsur penting dalam pelaksanaan SDGs Desa. Pendataan diperlukan untuk mengetahui kondisi rumah tangga, tingkat kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan, serta akses layanan dasar. Tanpa data yang baik, desa sulit menentukan prioritas pembangunan secara tepat. Pendataan SDGs Desa membantu pemerintah desa menghindari keputusan yang hanya berdasarkan perkiraan atau kebiasaan, sehingga pengeluaran desa dapat diarahkan pada masalah yang paling mendesak. Dalam penelitian ini, keberadaan dan penggunaan data SDGs Desa akan menjadi salah satu aspek penting dalam melihat kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengeluaran Desa Kurungan Nyawa.⁸⁶

SDGs Desa juga memiliki fungsi evaluatif. Capaian pembangunan desa dapat dinilai melalui indikator yang menunjukkan perubahan kondisi masyarakat. Dengan indikator

⁸⁵ Reni Febriani dan Suryadi Samudra, "Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa sebagai Upaya Menuju Kemandirian Desa Kotarindau," *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023): 337-345; Muhammad Fardh'lu Rizky dan Dadang Mashur, "Penerapan Sustainable Development Goals Desa," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 15 (2022): 385-394.

⁸⁶ Ahmad Izana, M. Yasin, dan Eka Septiani, "Implementasi SDGs Desa di Desa Antosari," *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 2 (2023): 90-104; Riska Tyas, Budi Santoso, dan Wulan Sari, "Model Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa untuk Akselerasi SDGs Desa," *Jurnal Perencanaan Pembangunan* 7, no. 2 (2023): 155-172.

tersebut, pemerintah desa dapat menilai apakah program yang dibiayai telah menghasilkan dampak, apakah sasaran sudah tepat, dan apakah perlu perbaikan kebijakan. Fungsi evaluatif ini penting karena banyak program desa secara administratif selesai, tetapi belum tentu memberi perubahan signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, keterkaitan antara realisasi belanja dan indikator SDGs Desa menjadi bagian penting dalam analisis implementasi pengeluaran desa.⁸⁷

Dalam literatur mutakhir, pengukuran SDGs menjadi tantangan karena indikator yang luas membutuhkan data yang akurat, metode klasifikasi yang tepat, serta konteks lokal yang memadai. Pada tingkat desa, tantangan ini lebih kompleks karena kapasitas pendataan dan analisis sering terbatas. Namun, pendekatan SDGs Desa tetap penting karena dapat mengarahkan pemerintah desa untuk melihat pembangunan secara menyeluruh. Desa tidak hanya menilai keberhasilan dari pembangunan jalan atau drainase, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan, ketahanan sosial, kualitas lingkungan, dan tata kelola. Hal ini sesuai dengan kebutuhan penelitian yang menganalisis hubungan pengeluaran desa dengan pembangunan berkelanjutan.⁸⁸

SDGs Desa memiliki hubungan erat dengan Dana Desa dan APBDes. Dana publik yang masuk ke desa seharusnya dapat

⁸⁷ Badan Pusat Statistik, *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2024* (Jakarta: BPS, 2024); Bappenas, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Edisi II* (Jakarta: Bappenas, 2022).

⁸⁸ Lukas Pukelis et al., “OSDG 2.0: A Multilingual Tool for Classifying Text Data by UN Sustainable Development Goals,” *arXiv* (2022): 1-21; Yury Kashnitsky et al., “Evaluating Approaches to Identifying Research Supporting the United Nations Sustainable Development Goals,” *arXiv* (2022): 1-25.

menjadi instrumen untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengeluaran desa yang dikelola dengan baik dapat memperbaiki pelayanan dasar, mengurangi kerentanan sosial, memperluas kesempatan ekonomi, dan menjaga lingkungan. Namun, apabila pengeluaran tidak berbasis kebutuhan dan indikator, maka kontribusinya terhadap SDGs Desa menjadi lemah. Oleh sebab itu, penelitian ini menilai apakah program yang dibiayai di Desa Kurungan Nyawa telah diarahkan pada tujuan SDGs Desa yang relevan.⁸⁹

Keberhasilan SDGs Desa juga ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Agenda pembangunan berkelanjutan menekankan prinsip *no one left behind*, sehingga kelompok miskin, perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan kelompok rentan harus diperhatikan dalam kebijakan desa. Partisipasi memastikan bahwa program tidak hanya mewakili kepentingan elite, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan warga. Dalam konteks pengeluaran desa, partisipasi dapat dilihat pada proses musyawarah, usulan kegiatan, pengawasan, dan evaluasi manfaat. Semakin kuat partisipasi masyarakat, semakin besar peluang belanja desa mendukung capaian SDGs Desa secara inklusif.⁹⁰

⁸⁹ Muhammad Kosat, Siti Nurjanah, dan Asep Hidayat, “Pengaruh Perencanaan, Transparansi, dan Akuntabilitas Dana Desa terhadap SDGs Desa,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik* 9, no. 1 (2024): 51-66; Eko Wibowo, “Dana Desa dan Akselerasi SDGs Desa,” *Jurnal Pembangunan Daerah* 12, no. 1 (2022): 22-38.

⁹⁰ UNDP, *Human Development Report 2023/2024* (New York: UNDP, 2024); OECD, *Measuring Distance to the SDG Targets 2022* (Paris: OECD Publishing, 2022).

SDGs Desa juga menuntut keseimbangan antara capaian jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Pembangunan fisik yang dibutuhkan masyarakat tetap penting, tetapi harus disertai pertimbangan lingkungan, pemeliharaan, manfaat ekonomi, dan keberlanjutan sosial. Misalnya, pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan drainase, aksesibilitas, keselamatan, dan dampak lingkungan. Program pemberdayaan ekonomi harus memperhatikan keberlanjutan usaha dan pasar. Dengan demikian, SDGs Desa membantu pemerintah desa menghindari pola pembangunan yang parsial dan mendorong pengeluaran yang lebih terarah.⁹¹

Dalam penelitian ini, SDGs Desa digunakan sebagai teori dan kerangka ukur yang menghubungkan pengeluaran desa dengan tujuan pembangunan. Analisis dilakukan dengan melihat kesesuaian program, proses implementasi, kelompok penerima manfaat, kendala pelaksanaan, dan kontribusi terhadap indikator pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menjelaskan bukan hanya apa saja pengeluaran desa, tetapi juga bagaimana pengeluaran tersebut mendukung kesejahteraan, pemerataan, lingkungan, dan kelembagaan. Dengan demikian, SDGs Desa menjadi dasar konseptual yang memperkuat arah penelitian tentang pengeluaran Desa Kurungan Nyawa.⁹²

⁹¹ Kementerian Desa PDTT, *Panduan Pendataan SDGs Desa* (Jakarta: Kemendesa PDTT, 2021); Fatmawati dan Hendra Kurniawan, "Pendataan SDGs Desa dan Kualitas Perencanaan Pembangunan," *Jurnal Governance* 5, no. 1 (2024): 44-59.

⁹² Anindya Putri dan Mulyadi, "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan SDGs Desa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 27, no. 2 (2023): 130-145; Nur Aini dan

Dalam perencanaan pembangunan, SDGs Desa dapat membantu desa menyusun prioritas yang lebih terarah. Tujuan-tujuan SDGs Desa memberikan kategori masalah yang dapat diterjemahkan ke dalam program tahunan. Misalnya, masalah stunting, sanitasi, pengangguran, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan dapat ditempatkan pada tujuan yang berbeda, tetapi tetap saling berkaitan. Dengan demikian, SDGs Desa mendorong pemerintah desa berpikir lintas sektor. Penelitian ini menggunakan cara pandang tersebut untuk melihat apakah pengeluaran Desa Kurungan Nyawa telah mencerminkan prioritas yang terintegrasi.⁹³

SDGs Desa juga memperkuat orientasi pengurangan kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari pendapatan, tetapi juga dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, pekerjaan, permukiman, dan perlindungan sosial. Karena itu, program desa yang mendukung keluarga miskin perlu bersifat multidimensi. Pengeluaran desa dapat diarahkan pada bantuan sosial, pelatihan kerja, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan pelayanan dasar. Dengan memakai kerangka SDGs Desa, penelitian dapat menilai apakah alokasi anggaran telah menyasar faktor penyebab kemiskinan secara lebih luas.⁹⁴

Rahmat Hidayat, “Kelembagaan Desa Dinamis dalam Pencapaian SDGs Desa,” *Jurnal Administrasi Desa* 4, no. 2 (2024): 88-103.

⁹³ Bappenas, *Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023* (Jakarta: Bappenas, 2023); Kementerian Desa PDTT, *Laporan Kinerja Kemendesa PDTT 2023* (Jakarta: Kemendesa PDTT, 2024).

⁹⁴ Sri Wahyuni dan Purnomo, “SDGs Desa dan Pengurangan Kemiskinan,” *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 18, no. 1 (2023): 53-68; Nurul Aisyah, “Indikator SDGs Desa dalam Perencanaan Pembangunan,” *Jurnal Pemerintahan Desa* 5, no. 2 (2024): 99-114.

Kualitas data SDGs Desa menentukan kualitas keputusan. Data yang tidak mutakhir, tidak lengkap, atau tidak dipakai dalam perencanaan dapat membuat program kurang tepat sasaran. Pemerintah desa perlu memperbarui data, memverifikasi kondisi lapangan, dan menjadikan data sebagai dasar musyawarah. Dalam penelitian ini, pemanfaatan data menjadi aspek penting karena pengeluaran desa yang mendukung SDGs seharusnya berangkat dari informasi yang faktual. Dengan demikian, keberhasilan SDGs Desa tidak hanya ditentukan oleh adanya aplikasi atau formulir pendataan, tetapi oleh penggunaan data dalam keputusan anggaran.⁹⁵

Pada tingkat global, pengukuran SDGs terus berkembang melalui pemetaan indikator, laporan capaian, dan metode klasifikasi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan membutuhkan sistem pemantauan yang serius. Desa dapat mengambil pelajaran bahwa setiap program perlu memiliki ukuran hasil, bukan hanya daftar kegiatan. Pengeluaran desa yang dikaitkan dengan SDGs akan lebih mudah dievaluasi karena memiliki tujuan yang jelas. Penelitian ini menggunakan prinsip tersebut untuk membaca hubungan antara belanja desa dan capaian pembangunan di Kurungan Nyawa.⁹⁶

⁹⁵ Hadi Prabowo, "Kualitas Data Desa dan Pengambilan Keputusan Pembangunan," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah* 14, no. 2 (2023): 177-192; Lia Anggraini, "Pemanfaatan Sistem Informasi Desa untuk SDGs Desa," *Jurnal Teknologi Pemerintahan* 6, no. 1 (2024): 25-40.

⁹⁶ Li Li, Yu Zhao, dan Zhesi Shen, "Comparison of Sustainable Development Goals Labeling Systems Based on Topic Coverage," *arXiv* (2024): 1-18; UN Sustainable Development Solutions Network, *Sustainable Development Report 2023* (Dublin: Dublin University Press, 2023).

Pencapaian SDGs Desa membutuhkan kolaborasi. Pemerintah desa tidak dapat bekerja sendiri karena banyak tujuan membutuhkan dukungan pemerintah daerah, pendamping, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dunia usaha, tokoh agama, dan masyarakat. Kolaborasi membantu desa mengatasi keterbatasan anggaran dan kapasitas. Dalam konteks ekonomi syariah, kolaborasi juga dapat diperluas melalui nilai tolong-menolong, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, SDGs Desa dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai indikator teknis, tetapi juga sebagai agenda bersama untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.⁹⁷

SDGs Desa tidak dapat dicapai hanya melalui dokumen perencanaan, tetapi membutuhkan perubahan cara kerja pemerintahan desa. Aparatur desa perlu memahami indikator, masyarakat perlu dilibatkan, dan program harus dipantau secara berkala. Kelembagaan desa yang dinamis menjadi penting karena capaian SDGs memerlukan koordinasi antarlembaga dan kesinambungan program lintas tahun anggaran. Dalam penelitian ini, SDGs Desa menjadi standar yang memperlihatkan apakah pengeluaran desa telah disusun sebagai program pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.⁹⁸

⁹⁷ Anas Malik dan Nurhayati, “Ekonomi Syariah dan Agenda SDGs Desa,” *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2024): 201-218; Rini Kartika, “Kolaborasi Pemerintah Desa dalam Pencapaian SDGs,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (2023): 67-82.

⁹⁸ Dewi Kusuma dan R. Pratama, “Akselerasi SDGs Desa melalui Perencanaan Partisipatif,” *Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 1 (2024): 31-47; Arif Nugraha, “Penguatan Kelembagaan Desa untuk SDGs Desa,” *Jurnal Administrasi Publik Lokal* 6, no. 2 (2023): 81-98.

Selain menjadi pedoman, SDGs Desa menuntut adanya monitoring yang berkelanjutan. Monitoring diperlukan agar pemerintah desa mengetahui kemajuan program, hambatan pelaksanaan, dan perubahan kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, monitoring dapat dilakukan melalui laporan realisasi, verifikasi lapangan, forum masyarakat, dan pembaruan data. Tanpa monitoring, pengeluaran desa sulit dinilai kontribusinya terhadap indikator SDGs. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan monitoring sebagai unsur penting dalam membaca hubungan antara APBDes, pelaksanaan program, dan capaian pembangunan berkelanjutan di Desa Kurungan Nyawa.⁹⁹

D. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang berupaya memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep ini menolak cara pandang pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan mengabaikan dampak sosial serta lingkungan. Dalam konteks desa, pembangunan berkelanjutan menuntut pemerintah desa untuk menyeimbangkan kebutuhan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, pemerataan akses, pelestarian lingkungan, dan penguatan kelembagaan. Oleh karena itu, pengeluaran desa harus diarahkan agar mampu menghasilkan

⁹⁹ Sari Dewanti, "Integrasi SDGs Desa dalam APBDes," *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Desa* 7, no. 1 (2024): 11-27; Deden Suhendar, "Monitoring Indikator SDGs Desa," *Jurnal Perencanaan Wilayah* 13, no. 2 (2023): 211-226.

manfaat saat ini sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya dan kehidupan masyarakat desa pada masa depan.¹⁰⁰

Tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pilar ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan, produktivitas, lapangan kerja, dan kemandirian ekonomi lokal. Pilar sosial berkaitan dengan pemerataan, kesehatan, pendidikan, perlindungan kelompok rentan, dan kohesi sosial. Pilar lingkungan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, sanitasi, ketahanan iklim, dan kualitas permukiman. Dalam penelitian ini, ketiga pilar tersebut dipakai untuk melihat apakah pengeluaran desa hanya berfokus pada belanja fisik atau telah menyentuh dimensi pembangunan yang lebih luas. Pengeluaran desa yang berkelanjutan harus mampu mengintegrasikan ketiga pilar tersebut secara seimbang.¹⁰¹

Pemikiran pembangunan berkelanjutan juga menekankan batas ekologis. Pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan dapat menimbulkan kerusakan yang justru menghambat kesejahteraan masyarakat. Di desa, masalah lingkungan dapat muncul dalam bentuk banjir, kerusakan lahan, pencemaran, sampah, kurangnya sanitasi, dan menurunnya kualitas sumber daya alam. Karena itu, pengeluaran desa perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dari setiap kegiatan. Belanja untuk pembangunan jalan, drainase, air bersih, atau

¹⁰⁰ World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987); Jeffrey D. Sachs, *The Age of Sustainable Development* (New York: Columbia University Press, 2015).

¹⁰¹ John Blewitt, *Understanding Sustainable Development*, 3rd ed. (London: Routledge, 2022); Peter P. Rogers, Kazi F. Jalal, dan John A. Boyd, *An Introduction to Sustainable Development*, 2nd ed. (London: Routledge, 2021).

kegiatan ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai output fisik, tetapi sebagai bagian dari sistem kehidupan desa yang harus dijaga keberlanjutannya.¹⁰²

Dalam kebijakan nasional, pembangunan berkelanjutan menjadi arah penting pembangunan Indonesia. Tujuan pembangunan berkelanjutan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan, indikator pembangunan, dan kebijakan lintas sektor. Desa memiliki peran penting karena banyak indikator pembangunan nasional berkaitan dengan kondisi masyarakat desa, seperti kemiskinan, pangan, pendidikan, kesehatan, air bersih, pekerjaan, lingkungan, dan kelembagaan. Oleh sebab itu, pembangunan berkelanjutan di tingkat desa bukan agenda tambahan, melainkan bagian dari strategi nasional. Penelitian ini menempatkan pengeluaran desa sebagai instrumen yang dapat mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan apabila direncanakan dan dilaksanakan secara tepat.¹⁰³

Pembangunan desa berkelanjutan memerlukan pendekatan berbasis lokal. Setiap desa memiliki masalah dan potensi yang berbeda sehingga model pembangunan tidak dapat diseragamkan. Desa Kurungan Nyawa perlu dianalisis berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaannya. Program yang tepat untuk satu desa belum tentu tepat untuk desa lain. Karena itu, pengeluaran desa harus disusun melalui proses yang memahami konteks lokal, melibatkan masyarakat, dan

¹⁰² Kate Raworth, *Doughnut Economics* (London: Random House, 2017); Johan Rockstrom et al., "Safe and Just Earth System Boundaries," *Nature* 619 (2023): 102-111.

¹⁰³ Bappenas, *Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2021-2024* (Jakarta: Bappenas, 2021); Bappenas, *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030* (Jakarta: Bappenas, 2023).

menggunakan data. Pendekatan ini penting agar pembangunan desa tidak hanya mengikuti pola rutin anggaran, tetapi menjawab kebutuhan yang benar-benar dirasakan oleh warga.¹⁰⁴

Pembangunan berkelanjutan juga berkaitan dengan ketahanan masyarakat. Ketahanan menunjukkan kemampuan masyarakat menghadapi risiko ekonomi, sosial, kesehatan, bencana, dan lingkungan. Pengeluaran desa dapat berperan membangun ketahanan melalui program pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial tepat sasaran, penguatan layanan kesehatan, infrastruktur adaptif, dan pengelolaan lingkungan. Desa yang berkelanjutan bukan hanya desa yang memiliki infrastruktur, tetapi desa yang warganya mampu bertahan dan berkembang ketika menghadapi perubahan. Oleh karena itu, penelitian ini menilai pengeluaran desa dalam hubungannya dengan penguatan kapasitas masyarakat dan pengurangan kerentanan.¹⁰⁵

Konsep pembangunan manusia memperluas pemahaman pembangunan berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga perluasan pilihan dan kemampuan manusia. Desa yang berhasil membangun adalah desa yang mampu memperbaiki akses pendidikan, kesehatan, informasi, pekerjaan, lingkungan hidup, dan ruang partisipasi warga. Dalam konteks ini, pengeluaran desa harus dilihat sebagai sarana untuk memperluas kemampuan masyarakat. Belanja untuk pelatihan,

¹⁰⁴ Kementerian Desa PDTT, *Pembangunan Desa Berkelanjutan Berbasis SDGs Desa* (Jakarta: Kemendesa PDTT, 2022); Ivanovich Agusta, "Pembangunan Desa dan Transformasi Sosial," *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 10, no. 2 (2022): 93-108.

¹⁰⁵ Rudiarto, Handayani, dan Sardjito, "Sustainable Rural Development in Indonesia," *Sustainability* 14, no. 5 (2022): 1-17; Nora Haenn, Allison Harnish, dan Richard Wilk, *The Environment in Anthropology*, 2nd ed. (New York: NYU Press, 2022).

pelayanan kesehatan, pendidikan anak usia dini, sanitasi, dan kelembagaan dapat memiliki nilai strategis karena meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan masyarakat.¹⁰⁶

Dari perspektif tata kelola, pembangunan berkelanjutan membutuhkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan kolaboratif. Tanpa tata kelola yang baik, anggaran pembangunan dapat kehilangan arah atau tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa perlu membangun kerja sama dengan BPD, lembaga kemasyarakatan, pemerintah daerah, pendamping desa, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan karena pembangunan berkelanjutan memiliki persoalan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor. Dalam penelitian ini, pengeluaran desa dianalisis dalam kerangka tata kelola pembangunan yang melibatkan banyak pihak.¹⁰⁷

Pembangunan berkelanjutan di wilayah Lampung dan pedesaan pada umumnya menghadapi tantangan integrasi antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan perlindungan lingkungan. Program desa sering kali lebih mudah diarahkan pada pembangunan fisik yang terlihat, sementara program pemberdayaan, lingkungan, dan kelembagaan membutuhkan proses lebih panjang. Padahal pembangunan yang hanya menekankan aspek fisik dapat kurang berkelanjutan apabila tidak diikuti pemeliharaan, peningkatan kapasitas warga, dan

¹⁰⁶ UNDP, Human Development Report 2023/2024 (New York: UNDP, 2024); United Nations, The Sustainable Development Goals Report 2024 (New York: United Nations, 2024).

¹⁰⁷ Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Anchor Books, 1999); Martha C. Nussbaum, *Creating Capabilities* (Cambridge: Harvard University Press, 2021).

perubahan perilaku. Karena itu, penelitian ini penting untuk melihat apakah pengeluaran Desa Kurungan Nyawa telah mengarah pada integrasi pembangunan yang lebih menyeluruh.¹⁰⁸

Konsep pembangunan berkelanjutan juga menuntut adanya evaluasi manfaat jangka panjang. Suatu kegiatan desa dapat dianggap berhasil secara administratif ketika selesai dilaksanakan, tetapi belum tentu berkelanjutan apabila tidak dimanfaatkan, tidak dipelihara, atau tidak memberi dampak. Oleh karena itu, belanja desa harus dianalisis dari sisi output, outcome, dan keberlanjutan manfaat. Kegiatan pembangunan jalan, drainase, sanitasi, ekonomi produktif, atau pelatihan harus dilihat apakah benar-benar memperbaiki kehidupan warga. Pendekatan ini membantu penelitian menilai implementasi pengeluaran desa secara lebih kritis.¹⁰⁹

Dalam penelitian ini, pembangunan berkelanjutan berfungsi sebagai teori penghubung antara pengeluaran desa dan SDGs Desa. Teori ini menjelaskan mengapa belanja desa harus diarahkan pada keseimbangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Dengan memakai perspektif pembangunan berkelanjutan, analisis tidak berhenti pada besaran anggaran, tetapi melihat kualitas manfaat, pemerataan, partisipasi, dan daya tahan program. Pengeluaran Desa Kurungan Nyawa akan dipahami sebagai bagian dari upaya membangun desa yang tidak

¹⁰⁸ Syaiful Bahri dan Erlin Kurniati, "Strategi Pembangunan Berkelanjutan Perkotaan-Pedesaan: Studi Kasus Lampung," *Global: Jurnal Lentera BITEP* 3, no. 3 (2025): 117-131; Emenda Tinalyta Depari, "Pembangunan Berkelanjutan: Integrasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan," *Circle Archive* 1, no. 5 (2024): 1-13.

¹⁰⁹ Robert Chambers, *Rural Development: Putting the Last First* (London: Routledge, 2019); Norman Uphoff, *Local Institutional Development* (West Hartford: Kumarian Press, 2022).

hanya maju secara fisik, tetapi juga sejahtera, adil, ramah lingkungan, dan kuat secara kelembagaan.¹¹⁰

Pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi keadilan. Keadilan berarti manfaat pembangunan harus dapat diakses oleh masyarakat luas, terutama mereka yang rentan. Dalam konteks desa, keadilan pembangunan dapat dilihat dari apakah belanja desa memperhatikan wilayah yang tertinggal, keluarga miskin, perempuan, anak, dan kelompok yang sulit mengakses layanan. Pembangunan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu tidak dapat disebut berkelanjutan karena berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memandang pemerataan manfaat sebagai bagian penting dari analisis pengeluaran desa.¹¹¹

Infrastruktur desa menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan apabila dirancang sesuai kebutuhan dan dipelihara secara memadai. Jalan, drainase, jembatan kecil, sarana air bersih, dan fasilitas umum dapat memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan dan kegiatan ekonomi. Namun, infrastruktur yang dibangun tanpa memperhatikan lingkungan dan pemeliharaan dapat cepat rusak atau menimbulkan masalah baru. Karena itu, belanja infrastruktur perlu dikaitkan dengan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Analisis ini membantu menilai

¹¹⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik dan Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: CAPS, 2022); Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

¹¹¹ Michael Redclift dan Delyse Springett, *Routledge International Handbook of Sustainable Development* (London: Routledge, 2022); Melissa Leach, "Equity and Sustainability in Development," *Development and Change* 54, no. 1 (2023): 7-28.

apakah pengeluaran desa memberi manfaat yang bertahan lama.¹¹²

Pembangunan berkelanjutan juga terkait dengan ketahanan pangan dan lingkungan. Desa sebagai wilayah yang dekat dengan sumber daya alam memiliki peran strategis dalam menjaga lahan, air, dan produksi pangan. Pengeluaran desa dapat mendukung ketahanan pangan melalui kegiatan pertanian, pekarangan produktif, irigasi kecil, pelatihan, atau kelembagaan ekonomi. Program tersebut perlu dirancang agar tidak merusak lingkungan. Dalam penelitian ini, dimensi pangan dan lingkungan menjadi bagian dari penilaian karena SDGs Desa memuat tujuan desa tanpa kelaparan, konsumsi sadar lingkungan, dan desa tanggap perubahan iklim.¹¹³

Kondisi lingkungan hidup menjadi dasar penting dalam perencanaan desa. Masalah sampah, sanitasi, banjir, kualitas air, dan penggunaan lahan dapat mempengaruhi kesehatan dan ekonomi masyarakat. Pengeluaran desa yang peka lingkungan dapat membantu mencegah biaya sosial yang lebih besar pada masa depan. Misalnya, belanja drainase dan sanitasi dapat mengurangi risiko penyakit, sedangkan penghijauan dapat memperbaiki kualitas lingkungan. Oleh sebab itu, pembangunan

¹¹² Budi Harsono, "Pembangunan Desa Berkelanjutan dan Kemandirian Lokal," *Jurnal Pembangunan Sosial* 10, no. 2 (2023): 120-136; Diah Setyowati, "Infrastruktur Desa dan Keberlanjutan Lingkungan," *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 11, no. 1 (2023): 44-58.

¹¹³ UNEP, *Global Environment Outlook 2024* (Nairobi: UNEP, 2024); FAO, *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024* (Rome: FAO, 2024).

berkelanjutan menuntut pemerintah desa menghitung manfaat dan risiko lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan.¹¹⁴

Pemberdayaan masyarakat merupakan inti pembangunan berkelanjutan karena masyarakat bukan hanya objek penerima program, tetapi subjek pembangunan. Pemberdayaan meningkatkan kemampuan warga mengidentifikasi masalah, mengelola potensi, dan mengambil keputusan. Pengeluaran desa yang diarahkan pada pemberdayaan dapat memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial. Program pelatihan, penguatan kelompok usaha, kader kesehatan, atau kelembagaan desa dapat menghasilkan manfaat jangka panjang. Dalam penelitian ini, pemberdayaan menjadi ukuran penting untuk melihat apakah pengeluaran desa mendorong kemandirian atau hanya menghasilkan ketergantungan.¹¹⁵

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan memberikan ukuran nilai bagi pengeluaran desa. Belanja desa dinilai baik apabila mampu menghasilkan manfaat ekonomi, memperluas keadilan sosial, menjaga lingkungan, dan memperkuat partisipasi. Perspektif ini membuat penelitian lebih komprehensif karena tidak hanya melihat administrasi keuangan, tetapi juga arah perubahan yang dihasilkan. Pembangunan berkelanjutan menjadi

¹¹⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2023* (Jakarta: KLHK, 2023); BPS, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024* (Jakarta: BPS, 2024).

¹¹⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2021); Jim Ife, *Community Development in an Uncertain World* (Cambridge: Cambridge University Press, 2022).

jembatan antara SDGs Desa sebagai indikator dan maqashid syariah sebagai nilai kemaslahatan.¹¹⁶

Keberlanjutan program desa juga ditentukan oleh kesinambungan antarperiode anggaran. Banyak program yang bermanfaat membutuhkan pemeliharaan, pendampingan, dan evaluasi lebih dari satu tahun. Karena itu, pembangunan berkelanjutan menuntut agar pengeluaran desa tidak bersifat terputus-putus, tetapi memiliki arah jangka menengah yang konsisten dengan RPJMDes dan SDGs Desa. Dalam penelitian ini, kesinambungan tersebut penting untuk menilai apakah program yang dibiayai oleh desa benar-benar membangun kapasitas masyarakat dan memperkuat daya tahan lingkungan sosial maupun ekologis.¹¹⁷

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat. Program desa yang disusun tanpa memahami aspirasi warga cenderung sulit dipelihara dan kurang dimanfaatkan. Sebaliknya, program yang lahir dari kebutuhan masyarakat lebih mudah dijaga karena warga merasa memiliki. Oleh karena itu, pengeluaran desa harus terhubung dengan proses partisipatif sejak perencanaan sampai evaluasi. Dalam penelitian ini, partisipasi dipahami sebagai mekanisme untuk memastikan

¹¹⁶ Nur Hidayah dan Arif Rahman, "Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Partisipasi Masyarakat Desa," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 2 (2024): 155-170.

¹¹⁷ Teguh Kurniawan, "Governance for Sustainable Development at Local Level," *Jurnal Ilmu Administrasi* 21, no. 1 (2024): 1-18; Ratih Puspitasari, "Keberlanjutan Program Desa dan Evaluasi Manfaat," *Jurnal Kebijakan Sosial* 15, no. 2 (2023): 143-159.

bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi konsep, tetapi benar-benar hidup dalam praktik pemerintahan desa.¹¹⁸

E. Teori Maqashid Syariah

Maqashid syariah dapat dijadikan kerangka evaluasi program publik karena mengarahkan penggunaan sumber daya pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yulita serta Azis, Ghozali, dan Habibi menunjukkan bahwa nilai keberlanjutan, keadilan sosial, perlindungan harta, dan tata kelola yang etis dapat dianalisis melalui perspektif maqashid syariah.³

Dalam konteks desa, hasil penelitian Hanif, Hayati, dan Susilawati mengenai BUMDes memperlihatkan pentingnya pengembangan potensi lokal bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut memperkuat argumentasi bahwa pengeluaran desa perlu dinilai berdasarkan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi warga.⁴

Maqashid Syariah merupakan teori yang menjelaskan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam kajian klasik, maqashid mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perkembangan kontemporer, maqashid juga dipahami secara lebih luas sebagai kerangka etis untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, martabat manusia, tata kelola yang baik, dan keberlanjutan lingkungan. Teori ini relevan untuk penelitian

¹¹⁸ Andi Mappiare, "Evaluasi Pembangunan Berkelanjutan di Pemerintahan Lokal," *Jurnal Administrasi dan Pembangunan* 12, no. 1 (2024): 61-78; Lilis Suryani, "Partisipasi Warga dan Keberlanjutan Program Desa," *Jurnal Sosial Humaniora* 15, no. 2 (2023): 95-111.

ekonomi syariah karena pengeluaran desa tidak hanya dinilai dari efektivitas administratif, tetapi juga dari manfaatnya bagi kemaslahatan masyarakat.¹¹⁹

Dalam ekonomi Islam, kebijakan publik dan penggunaan anggaran harus diarahkan untuk menghadirkan masalah. Anggaran yang dikelola pemerintah desa seharusnya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi kemiskinan, membuka kesempatan ekonomi, memperbaiki layanan sosial, dan menjaga amanah publik. Pengeluaran desa yang digunakan untuk kepentingan umum dapat dipahami sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan, selama dilaksanakan secara adil, transparan, tidak boros, dan tidak merugikan masyarakat. Dengan demikian, maqashid syariah dapat menjadi perspektif normatif untuk menilai apakah belanja desa selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam.¹²⁰

Perlindungan jiwa atau hifz al-nafs berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang menjaga keselamatan dan kualitas hidup manusia. Dalam konteks desa, pengeluaran untuk kesehatan, air bersih, sanitasi, penanggulangan bencana, lingkungan aman, dan bantuan bagi kelompok rentan dapat dikaitkan dengan tujuan ini. Pengeluaran desa tidak hanya membiayai kegiatan rutin, tetapi dapat menjadi sarana menjaga kehidupan masyarakat. Jika

¹¹⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, ed. Abdullah Darraz (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2021); Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2022).

¹²⁰ Mohammad Hashim Kamali, *The Objectives of Islamic Law: The Promises and Challenges of the Maqasid al-Shariah* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2022); Tariq Ramadan, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation* (Oxford: Oxford University Press, 2022).

anggaran desa diarahkan pada layanan dasar dan pengurangan risiko, maka pengeluaran tersebut memiliki nilai maqashid karena melindungi manusia dari bahaya dan meningkatkan kesejahteraan.¹²¹

Perlindungan akal atau *hifz al-aql* berkaitan dengan pendidikan, pengetahuan, literasi, dan kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan yang baik. Pada tingkat desa, pengeluaran yang mendukung pendidikan anak usia dini, pelatihan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur, literasi keuangan, dan akses informasi dapat dipahami sebagai bagian dari perlindungan akal. SDGs Desa juga menempatkan pendidikan berkualitas dan kelembagaan dinamis sebagai tujuan penting. Dengan demikian, belanja desa yang memperkuat pengetahuan warga dan aparatur tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga memiliki dimensi syariah karena meningkatkan kualitas manusia.¹²²

Perlindungan harta atau *hifz al-mal* berkaitan dengan keadilan ekonomi, perlindungan aset, penggunaan sumber daya secara amanah, dan pengembangan kesejahteraan. Dalam konteks pengeluaran desa, prinsip ini menuntut agar anggaran dikelola secara transparan, efisien, dan tidak disalahgunakan. Program pemberdayaan ekonomi, penguatan usaha lokal, pembangunan

¹²¹ Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Islamic Foundation, 2021); M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2022).

¹²² Muhammad Arrazi, "Maqasid al-Shariah and Sustainable Finance: Analyzing the Impact of Green Sukuk Allocation in Indonesia," *Muslim Business and Economics Review* 4, no. 1 (2025): 89-107; Reza Fahlevi, "Maqashid Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2023): 144-160.

infrastruktur produktif, dan dukungan terhadap kelompok miskin dapat memperkuat *hifz al-mal*. Pada sisi lain, penyimpangan anggaran, pemborosan, dan program yang tidak bermanfaat bertentangan dengan *maqashid* karena merusak amanah harta publik.¹²³

Perlindungan keturunan atau *hifz al-nasl* dapat dipahami sebagai upaya menjaga keberlanjutan keluarga dan generasi mendatang. Pengeluaran desa yang mendukung kesehatan ibu dan anak, pendidikan, lingkungan permukiman layak, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial memiliki hubungan dengan tujuan ini. Pembangunan desa tidak boleh hanya memenuhi kepentingan jangka pendek, tetapi harus memastikan bahwa generasi mendatang memperoleh lingkungan yang sehat, akses pendidikan, dan kesempatan hidup yang lebih baik. Oleh sebab itu, *maqashid syariah* sejalan dengan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kepentingan lintas generasi.¹²⁴

Dalam perkembangan kontemporer, banyak sarjana mengaitkan *maqashid syariah* dengan SDGs. Keduanya memiliki titik temu pada tujuan keadilan, pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, kesejahteraan, dan tata kelola. SDGs Desa dapat dipandang sebagai instrumen teknis untuk mengukur pembangunan, sedangkan *maqashid syariah* memberi dasar nilai dan etika bagi arah pembangunan tersebut. Dalam penelitian ini,

¹²³ Monzer Kahf, *Islamic Economics and Finance: A Glossary*, 2nd ed. (Kuala Lumpur: IBFIM, 2022); M. Kabir Hassan, Mervyn K. Lewis, dan Mehmet Asutay, *Handbook of Islamic Banking and Finance* (Cheltenham: Edward Elgar, 2022).

¹²⁴ Asep Saepudin Jahar, "Maqasid al-Shariah and Social Policy in Muslim Societies," *Studia Islamika* 30, no. 1 (2023): 1-28; Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2022).

hubungan keduanya penting karena tema pengeluaran desa dianalisis dalam program studi ekonomi syariah. Pengeluaran desa yang mendukung SDGs Desa dapat dinilai sebagai upaya mewujudkan masalah apabila programnya memenuhi prinsip keadilan, amanah, dan kebermanfaatan.¹²⁵

Maqashid syariah juga menekankan prinsip keadilan distribusi. Keadilan distribusi berarti manfaat pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus menjangkau masyarakat luas, terutama kelompok miskin dan rentan. Dalam konteks desa, hal ini berarti pengeluaran harus mempertimbangkan kebutuhan rumah tangga miskin, perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, petani kecil, dan pelaku usaha mikro. Apabila belanja desa hanya menguntungkan kelompok tertentu, maka prinsip maqashid belum terpenuhi. Oleh karena itu, penelitian ini memperhatikan aspek ketepatan sasaran dan pemerataan manfaat program desa.¹²⁶

Dari sisi tata kelola, maqashid syariah menuntut amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan larangan merugikan pihak lain. Pengelolaan anggaran desa merupakan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Nilai ini memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Pengeluaran desa yang dilakukan

¹²⁵ Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqasid al-Shariah and Corporate Social Responsibility," *The American Journal of Islamic Social Sciences* 39, no. 3 (2022): 25-48; Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (London: IIIT, 2021).

¹²⁶ Siti Khadijah Ab Manan, Fadilah Mansor, dan Azman Ab Rahman, "Maqasid al-Shariah for Sustainable Development," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 6 (2023): 985-1003; Aam Slamet Rusydiana, "Maqasid Index and Islamic Development," *Journal of Islamic Economics* 15, no. 1 (2024): 77-92.

secara terbuka dan bertanggung jawab akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sedangkan penyimpangan dapat merusak kemaslahatan. Dengan demikian, maqashid syariah memberikan landasan moral bagi analisis pengeluaran desa selain landasan regulatif dan administratif.¹²⁷

Pengeluaran desa yang mendukung pembangunan berkelanjutan dapat dipandang sebagai bentuk realisasi maqashid dalam konteks kontemporer. Kegiatan yang menjaga lingkungan, menyediakan air bersih, meningkatkan ekonomi warga, memperkuat pendidikan, dan melindungi kelompok rentan merupakan bentuk masalah yang nyata. Namun, realisasi maqashid membutuhkan proses implementasi yang baik, data yang benar, partisipasi masyarakat, dan pengawasan. Jika prosesnya lemah, maka tujuan kemaslahatan sulit dicapai meskipun programnya secara formal terlihat baik. Oleh sebab itu, maqashid syariah dalam penelitian ini digunakan untuk membaca dimensi nilai dari pengeluaran desa.¹²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, teori maqashid syariah berfungsi sebagai perspektif normatif dalam penelitian ini. Teori kebijakan publik menjelaskan proses implementasi, teori pengeluaran desa menjelaskan penggunaan anggaran, SDGs Desa menjelaskan tujuan pembangunan, sedangkan maqashid syariah menilai

¹²⁷ Muhammad Iqbal Fasa, "Maqashid Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1-14; Nur Ika Mauliyah, Hikmatul Hasanah, dan Miftahul Hasanah, "Potensi Pengembangan Green Sukuk dan Aspek Hukum di Indonesia," *Ekonomica Sharia* 8, no. 2 (2023): 221-234.

¹²⁸ Abdul Ghafar Ismail, *Islamic Economics: Theory, Policy and Social Justice* (Kuala Lumpur: Palgrave, 2022); M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2021).

apakah seluruh proses tersebut menghasilkan kemaslahatan. Dengan memadukan perspektif tersebut, penelitian dapat menganalisis pengeluaran Desa Kurungan Nyawa secara lebih komprehensif, yaitu dari sisi kebijakan, anggaran, keberlanjutan, dan nilai-nilai ekonomi Islam. Hal ini memperkuat posisi penelitian dalam program studi Ekonomi Syariah.¹²⁹

Maqashid syariah kontemporer berkembang dari pendekatan perlindungan menuju pendekatan pengembangan. Jika pendekatan klasik menekankan penjagaan lima unsur pokok, pendekatan kontemporer menambahkan nilai pengembangan manusia, hak, kebebasan yang bertanggung jawab, keadilan, dan tata kelola. Perkembangan ini membuat maqashid relevan untuk membaca isu pembangunan desa. Pengeluaran desa tidak hanya menjaga kebutuhan dasar, tetapi juga harus mengembangkan potensi masyarakat agar lebih mandiri. Dengan demikian, maqashid dapat menjadi kerangka etis sekaligus kerangka pembangunan.¹³⁰

Prinsip masalah dalam maqashid menuntut adanya prioritas. Tidak semua kebutuhan memiliki tingkat urgensi yang sama. Dalam fiqh maqashid dikenal tingkatan dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Kebutuhan dharuriyyat harus didahulukan karena menyangkut keselamatan dasar manusia, sedangkan kebutuhan

¹²⁹ Rafiq Yunus al-Misri, *Usul al-Iqtisad al-Islami* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2021); Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

¹³⁰ M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dalam Studi Agama dan Keislaman* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2021); Auda Jasser, *Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach* (London: Claritas, 2021).

hajiyyat dan tahsiniyyat melengkapi kualitas hidup. Prinsip prioritas ini relevan dalam pengeluaran desa karena anggaran terbatas. Pemerintah desa perlu mendahulukan program yang menyangkut kemiskinan, kesehatan, air bersih, pangan, dan keselamatan masyarakat sebelum kegiatan yang bersifat pelengkap.¹³¹

Maqashid juga mengajarkan bahwa kemaslahatan publik harus menghindari mafsadah. Dalam konteks anggaran desa, mafsadah dapat berupa korupsi, pemborosan, diskriminasi, konflik sosial, kerusakan lingkungan, atau program yang tidak bermanfaat. Karena itu, pengeluaran desa perlu diuji dari sisi manfaat dan mudaratnya. Program yang secara administratif sah belum tentu sesuai maqashid apabila menimbulkan kerugian masyarakat. Pendekatan ini memberi kedalaman etis dalam penelitian karena belanja desa dinilai bukan hanya berdasarkan aturan, tetapi juga berdasarkan konsekuensi moral dan sosialnya.¹³²

Integrasi maqashid dengan SDGs Desa memperlihatkan bahwa tujuan pembangunan modern dapat dibaca melalui nilai Islam. Desa tanpa kemiskinan sejalan dengan perlindungan harta dan jiwa, pendidikan berkualitas sejalan dengan perlindungan akal, kesehatan dan sanitasi sejalan dengan perlindungan jiwa, sedangkan lingkungan berkelanjutan sejalan dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Integrasi ini penting agar

¹³¹ Yusuf al-Qaradawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Shariah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2021); Ahmad Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi* (Beirut: Dar al-Kalimah, 2022).

¹³² Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2021); Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2021).

penelitian ekonomi syariah tidak berhenti pada terminologi, tetapi mampu menjelaskan hubungan antara nilai Islam dan praktik kebijakan pembangunan desa.¹³³

Dalam keuangan publik Islam, pemimpin dipandang sebagai pemegang amanah. Amanah tersebut menuntut penggunaan sumber daya publik untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Pengeluaran desa karena itu harus dilaksanakan dengan niat kemaslahatan, prosedur yang benar, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai amanah melengkapi prinsip good governance karena memberi dasar spiritual pada transparansi dan akuntabilitas. Dalam penelitian ini, nilai amanah dipakai untuk membaca komitmen aparatur desa dalam mengelola APBDes.¹³⁴

Dengan tambahan perspektif tersebut, maqashid syariah menjadi teori yang sangat sesuai untuk penelitian ini. Tema pengeluaran desa dan SDGs Desa berada pada persilangan antara kebijakan publik, ekonomi pembangunan, dan etika Islam. Maqashid membantu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur dan angka anggaran, tetapi dari perlindungan manusia, pemerataan manfaat, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab moral. Karena itu, teori ini menjadi landasan

¹³³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2022); Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2022).

¹³⁴ Habib Ahmed, *Product Development in Islamic Banks* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2022); Abbas Mirakhor dan Zamir Iqbal, *Economic Development and Islamic Finance* (Washington DC: World Bank, 2021).

penting dalam menyimpulkan makna pengeluaran desa bagi kemaslahatan masyarakat Kurungan Nyawa.¹³⁵

Maqashid syariah sebagai etika kebijakan publik menempatkan pemerintah sebagai pelayan kemaslahatan. Dalam pengeluaran desa, nilai ini menuntut agar keputusan anggaran tidak semata-mata mengejar kepentingan politik, melainkan kebutuhan masyarakat yang paling nyata. Nilai keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar untuk membaca kualitas kebijakan desa. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan maqashid syariah untuk menilai apakah implementasi pengeluaran Desa Kurungan Nyawa telah mendukung kehidupan yang lebih baik, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.¹³⁶

Dalam pengelolaan dana publik, maqashid syariah menekankan keseimbangan antara kepatuhan prosedural dan manfaat substantif. Anggaran yang prosedurnya benar tetap perlu dinilai dari dampaknya terhadap kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan masyarakat. Prinsip ini membuat analisis pengeluaran desa tidak berhenti pada laporan keuangan, tetapi berlanjut pada pertanyaan apakah program benar-benar menghadirkan maslahat. Karena itu, maqashid syariah menjadi

¹³⁵ Lailatul Qodriyah dan Moh. Khoiruddin, "Maqashid Syariah dan Tata Kelola Keuangan Publik Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024): 55-70.

¹³⁶ Zainal Abidin, "Maqashid Syariah sebagai Etika Kebijakan Publik," *Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2024): 65-83; Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 2022).

alat untuk menguji kualitas etis dari kebijakan pengeluaran desa dalam mendukung SDGs Desa.¹³⁷

F. Kerangka Berpikir

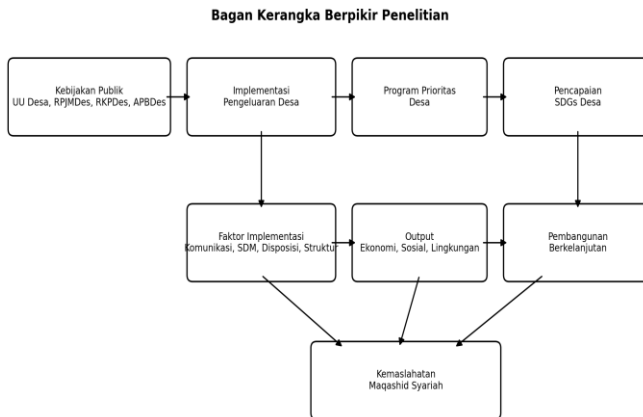
Kerangka berpikir merupakan alur logis yang menjelaskan hubungan antara teori, konsep, dan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir dibangun dari pandangan bahwa pengeluaran desa merupakan bagian dari implementasi kebijakan publik di tingkat desa. Kebijakan tersebut lahir melalui perencanaan pembangunan desa, dituangkan dalam APBDes, dilaksanakan melalui program dan kegiatan, kemudian dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian SDGs Desa. Dengan demikian, analisis tidak hanya diarahkan pada besarnya anggaran, tetapi pada proses, ketepatan sasaran, faktor pendukung, faktor penghambat, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.¹³⁸

Kerangka berpikir penelitian ini juga memasukkan perspektif pembangunan berkelanjutan dan maqashid syariah. Pembangunan berkelanjutan menjelaskan pentingnya keseimbangan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan, sedangkan maqashid syariah memberi dasar nilai bahwa pengeluaran publik harus menghasilkan kemaslahatan. Oleh karena itu, pengeluaran Desa Kurungan Nyawa dianalisis sebagai instrumen kebijakan yang seharusnya mendukung

¹³⁷ Heri Sudarsono, “Etika Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Dana Publik,” *Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2024): 19-35; M. Nur Kholis, “Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals,” *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (2023): 177-194.

¹³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022); John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 6th ed. (Los Angeles: Sage, 2023).

tujuan SDGs Desa sekaligus memperkuat kesejahteraan, keadilan, amanah, dan keberlanjutan. Alur hubungan konsep tersebut digambarkan dalam bagan berikut.¹³⁹



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Bagan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik menjadi dasar awal bagi pemerintah desa dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengeluaran desa. Implementasi pengeluaran desa kemudian dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Jika faktor-faktor tersebut berjalan baik, maka program prioritas desa akan lebih tepat sasaran dan mampu menghasilkan output pada dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Output tersebut selanjutnya diarahkan untuk mendukung pencapaian

¹³⁹ Miles, Huberman, dan Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Los Angeles: Sage, 2020); Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).

SDGs Desa sebagai ukuran pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.¹⁴⁰

Pada tahap akhir, pencapaian SDGs Desa dipahami tidak hanya sebagai keberhasilan administratif, tetapi juga sebagai jalan menuju kemaslahatan masyarakat. Perspektif maqashid syariah menegaskan bahwa pengeluaran desa harus melindungi jiwa, akal, harta, keturunan, dan kepentingan publik secara luas. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menempatkan pengeluaran Desa Kurungan Nyawa sebagai variabel utama yang dianalisis melalui proses implementasi, diarahkan pada capaian SDGs Desa, dan dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan serta nilai kemaslahatan dalam ekonomi Islam.¹⁴¹

¹⁴⁰ George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980); Kementerian Desa PDTT, *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Jakarta: Kemendesa PDTT, 2020).

¹⁴¹ Mohammad Hashim Kamali, *The Objectives of Islamic Law* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2022); United Nations, *The Sustainable Development Goals Report 2024* (New York: United Nations, 2024).

DAFTAR RUJUKAN

Aam Slamet Rusydiana, “Maqasid Index and Islamic Development,” *Journal of Islamic Economics* 15, no. 1 (2024).

Abbas Mirakhor dan Zamir Iqbal, *Economic Development and Islamic Finance* (Washington DC: World Bank, 2021).

Abdul Ghafar Ismail, *Islamic Economics: Theory, Policy and Social Justice* (Kuala Lumpur: Palgrave, 2022).

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2012).

Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2022).

Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2021).

Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, ed. Abdullah Darraz (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2021).

Agus Salim dan Nur Fitriani, “Belanja Desa dan Pencapaian Indikator Pembangunan Desa,” *Jurnal Pembangunan Wilayah* 16, no. 2 (2024).

Ahmad Izana, M. Yasin, dan Eka Septiani, “Implementasi SDGs Desa di Desa Antosari,” *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 2 (2023).

Ahmad Mustofa, “Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Anggaran,” *Jurnal Akuntansi Sektor Publik* 9, no. 2 (2023).

Ahmad Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi* (Beirut: Dar al-Kalimah, 2022).

Ahmad Subekti, "The Analysis of Village Fund Contribution to Achieve a National Sustainable Development Goal (SDGs Village) in Gadingrejo Village, Kepil Subdistrict, Wonosobo Regency," *International Journal of Social Science* 1, no. 5 (2022). <https://doi.org/10.53625/ijss.v1i5.1318>.

Alfiatul Faizah dan Retnosari, "Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa," *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022).

Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Anchor Books, 1999).

Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1999).

Anas Malik dan Nurhayati, "Ekonomi Syariah dan Agenda SDGs Desa," *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2024).

Andi Mappiare, "Evaluasi Pembangunan Berkelanjutan di Pemerintahan Lokal," *Jurnal Administrasi dan Pembangunan* 12, no. 1 (2024).

Anggara Sahya, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2022).

Anindya Putri dan Mulyadi, "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan SDGs Desa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 27, no. 2 (2023).

Ari Subowo, "Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Implementasi Kebijakan Publik," *Jurnal Administrasi Negara* 12, no. 2 (2024).

Arif Nugraha, “Penguatan Kelembagaan Desa untuk SDGs Desa,” *Jurnal Administrasi Publik Lokal* 6, no. 2 (2023).

Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

Aryani dan Nurhazana, “Analisis Strategi Pemerintah Desa dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Kecamatan Rupa,” *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.35314/iakp.v5.i2.325>.

Asep Saepudin Jahar, “Maqasid al-Shariah and Social Policy in Muslim Societies,” *Studia Islamika* 30, no. 1 (2023).

Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah, “Maqasid al-Shariah and Corporate Social Responsibility,” *The American Journal of Islamic Social Sciences* 39, no. 3 (2022).

Auda Jasser, *Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach* (London: Claritas, 2021).

Guy Peters, *Advanced Introduction to Public Policy*, 2nd ed. (Cheltenham: Edward Elgar, 2021).

B. Hari Saptaning Tyas, Condrodewi Puspitasari, dan Pius Suban Ballol, “Model Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa dalam Akselerasi Sustainable Development Goals Desa,” *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 13, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.34010/xqze9n83>.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Pedoman Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: BPKP, 2023).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesawaran Dalam Angka 2025 (Pesawaran: BPS Kabupaten Pesawaran, 2025).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Gedong Tataan Dalam Angka 2025 (Pesawaran: BPS Kabupaten Pesawaran, 2025).

Badan Pusat Statistik, Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2024 (Jakarta: BPS, 2024).

Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2025 (Jakarta: BPS, 2025).

Badan Pusat Statistik, “Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2025,” Tabel Statistik BPS, 2026.

Bambang Suryono dan Siti Aminah, “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 14, no. 2 (2023).

Bappenas, Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023 (Jakarta: Bappenas, 2023).

Bappenas, Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Edisi II (Jakarta: Bappenas, 2022).

Bappenas, Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030 (Jakarta: Bappenas, 2023).

Bappenas, Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2021-2024 (Jakarta: Bappenas, 2021).

Bastian Indra, *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2022).

Blane D. Lewis, “Decentralising to Villages in Indonesia: Money (and Other) Mistakes,” *Public Administration and Development* 35, no. 5 (2015).

BPS, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024 (Jakarta: BPS, 2024).

Budi Harsono, “Pembangunan Desa Berkelanjutan dan Kemandirian Lokal,” *Jurnal Pembangunan Sosial* 10, no. 2 (2023).

Budi Winarno, *Kebijakan Publik dan Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: CAPS, 2022).

Busyro, Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah (Jakarta: Kencana, 2022).

Christopher Hood, “A Public Management for All Seasons?,” *Public Administration* 69, no. 1 (1991).

Christopher M. Weible dan Paul A. Sabatier, *Theories of the Policy Process*, 5th ed. (New York: Routledge, 2023).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy* (Glenview: Scott, Foresman and Company, 1983).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy* (Lanham: University Press of America, 2021).

David C. Korten, “Community Organization and Rural Development: A Learning Process Approach,” *Public Administration Review* 40, no. 5 (1980).

David Le Blanc, “Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as a Network of Targets,” *Sustainable Development* 23, no. 3 (2015).

Deden Suhendar, “Monitoring Indikator SDGs Desa,” *Jurnal Perencanaan Wilayah* 13, no. 2 (2023).

Dewi Kusuma dan R. Pratama, “Akselerasi SDGs Desa melalui Perencanaan Partisipatif,” *Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 1 (2024).

Diah Setyowati, “Infrastruktur Desa dan Keberlanjutan Lingkungan,” *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 11, no. 1 (2023).

Dian Safitri dan Rachmad Hidayat, “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 21, no. 2 (2022).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Kebijakan Dana Desa Tahun 2024* (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2024).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, “Rincian Dana Desa per Desa TA 2025,” Kementerian Keuangan, 29 Oktober 2024.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, “Transparansi dan Keterbukaan Informasi adalah Pilar Paling Penting dalam Pengelolaan Dana Desa,” Kementerian Keuangan, 6 Agustus 2024.

Dokumen BAB IV Profil dan Visi Misi Desa Kurungan Nyawa. Kurungan Nyawa, 2026.

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework,” *Administration & Society* 6, no. 4 (1975).

Dwi Ratmono, *Akuntansi Keuangan Desa* (Semarang: Undip Press, 2022).

Dwipayana Ari dan Sutoro Eko, *Membangun Good Governance di Desa* (Yogyakarta: IRE Press, 2003).

Dwiyanto Agus, *Manajemen Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022).

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2021).

Edward B. Barbier, "The Concept of Sustainable Economic Development," *Environmental Conservation* 14, no. 2 (1987).

Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2022).

Eko Prasajo dan Teguh Kurniawan, "Reformasi Birokrasi dan Kebijakan Publik di Indonesia," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 19, no. 2 (2022).

Eko Wibowo, "Dana Desa dan Akselerasi SDGs Desa," *Jurnal Pembangunan Daerah* 12, no. 1 (2022).

Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

Elinor Ostrom, *Understanding Institutional Diversity* (Princeton: Princeton University Press, 2022).

Emenda Tinalyta Depari, "Pembangunan Berkelanjutan: Integrasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan," *Circle Archive* 1, no. 5 (2024).

Erna Wati, "Evaluasi Pengeluaran Desa dalam Mendukung Pembangunan Lokal," *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 10, no. 1 (2023).

Ersantiana Kue Wea dan Any Rustia Dewi, "Analisis Pelaksanaan Pengeluaran Biaya APBDesa dalam Menunjang Pembangunan Desa," *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan* 1, no. 1 (2019).

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2021).

FAO, *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024* (Rome: FAO, 2024).

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 2022).

Fatmawati dan Hendra Kurniawan, “Pendataan SDGs Desa dan Kualitas Perencanaan Pembangunan,” *Jurnal Governance* 5, no. 1 (2024).

Firda Tari Triani, “Efektivitas Kebijakan Sustainable Development Goals Desa, Tujuan: Desa Tanpa Kemiskinan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Ciamis,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 11, no. 2 (2024).

Fitrah Ramadhan, “Pengawasan Masyarakat terhadap APBDes,” *Jurnal Governance and Local Politics* 6, no. 1 (2024).

Frank Biermann et al., “Scientific Evidence on the Political Impact of the Sustainable Development Goals,” *Nature Sustainability* 5 (2022).

Frank Fischer dan Herbert Gottweis, *The Argumentative Turn Revisited* (Durham: Duke University Press, 2022).

Frank Fischer, Gerald J. Miller, dan Mara S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis* (Boca Raton: CRC Press, 2022).

Gaudensius Suni, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Mendukung Program Pemerintah Berbasis Sustainable Development Goals pada Desa Haumeni Kecamatan Bikomi

Utara Kabupaten Timor Tengah Utara,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 16, no. 2 (2025), <http://dx.doi.org/10.36448/jak.v16i2.4493>.

George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980).

Glenn A. Bowen, “Document Analysis as a Qualitative Research Method,” *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009).

Russell Bernard, *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches*, 6th ed. (Lanham: Rowman & Littlefield, 2018).

Habib Ahmed, *Product Development in Islamic Banks* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2022).

Hadi Prabowo, “Kualitas Data Desa dan Pengambilan Keputusan Pembangunan,” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah* 14, no. 2 (2023).

Hamdi Muchlis, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2022).

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011).

Hans Antlöv, Anna Wetterberg, dan Leni Dharmawan, “Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 52, no. 2 (2016).

Hasil wawancara dengan perangkat Desa Kurungan Nyawa: Yuwansyah (Kepala Desa), Dona Rayasa (Sekretaris Desa), Ledi Ariska, S.E. (Kaur Keuangan), Herlin Utami, A.Md. (Kaur Perencanaan), Setiawati N. Cahya (Kaur Umum), Hendra Saputra (Kasi Pemerintahan), M. Jerri Afratsim, S.E. (Kasi

Kesejahteraan), dan M. Arifin (Kasi Pelayanan). Kurungan Nyawa, 17 Juli 2026.

Helen Margetts dan Perri 6, “Digital Era Governance,” *Public Administration* 100, no. 1 (2022).

Heri Sudarsono, “Etika Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Dana Publik,” *Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2024).

Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga, 2010).

Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).

Ivanovich Agusta, “Pembangunan Desa dan Transformasi Sosial,” *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 10, no. 2 (2022).

James Anderson, *Public Policymaking*, 9th ed. (Boston: Cengage, 2022).

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2022).

Jeffrey D. Sachs et al., *Sustainable Development Report 2024* (Dublin: Dublin University Press, 2024).

Jeffrey D. Sachs, Guido Schmidt-Traub, Mariana Mazzucato, Dirk Messner, Nebojsa Nakicenovic, dan Johan Rockström, “Six Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals,” *Nature Sustainability* 2 (2019).

Jeffrey D. Sachs, *The Age of Sustainable Development* (New York: Columbia University Press, 2015).

Jim Ife, *Community Development in an Uncertain World* (Cambridge: Cambridge University Press, 2022).

Johan Rockstrom et al., “Safe and Just Earth System Boundaries,” *Nature* 619 (2023).

Johantri, “Implementasi Asas Pengelolaan Keuangan Desa,” *Jurnal Education and Development* 12, no. 3 (2024).

John Blewitt, *Understanding Sustainable Development*, 3rd ed. (London: Routledge, 2022).

John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018).

John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018).

John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018).

John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 6th ed. (Los Angeles: Sage, 2023).

Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2021).

Joseph E. Stiglitz dan Jay K. Rosengard, *Economics of the Public Sector*, 4th ed. (New York: W. W. Norton, 2015).

Kate Raworth, *Doughnut Economics* (London: Random House, 2017).

Kate Raworth, *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist* (London: Random House Business Books, 2017).

Kementerian Desa PDTT, Laporan Kinerja Kemendesa PDTT 2023 (Jakarta: Kemendesa PDTT, 2024).

Kementerian Desa PDTT, Panduan Pendataan SDGs Desa (Jakarta: Kemendesa PDTT, 2021).

Kementerian Desa PDTT, Pembangunan Desa Berkelanjutan Berbasis SDGs Desa (Jakarta: Kemendesa PDTT, 2022).

Kementerian Desa PDTT, SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (Jakarta: Kemendesa PDTT, 2020).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (Jakarta: Kemendesa PDTT, 2020).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa (Jakarta: Kemenkeu, 2023).

Kementerian Keuangan, Nota Keuangan APBN 2025 (Jakarta: Kemenkeu, 2024).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Status Lingkungan Hidup Indonesia 2023 (Jakarta: KLHK, 2023).

Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.

Kettl Donald F., *The Politics of the Administrative Process*, 8th ed. (Washington DC: CQ Press, 2023).

Lailatul Qodriyah dan Moh. Khoiruddin, “Maqashid Syariah dan Tata Kelola Keuangan Publik Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024).

Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, ed. revisi (Bandung: Alfabeta, 2022).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).

Li Li, Yu Zhao, dan Zhesi Shen, “Comparison of Sustainable Development Goals Labeling Systems Based on Topic Coverage,” arXiv (2024).

Lia Anggraini, “Pemanfaatan Sistem Informasi Desa untuk SDGs Desa,” *Jurnal Teknologi Pemerintahan* 6, no. 1 (2024).

Lilis Suryani, “Partisipasi Warga dan Keberlanjutan Program Desa,” *Jurnal Sosial Humaniora* 15, no. 2 (2023).

Lukas Pukelis et al., “OSDG 2.0: A Multilingual Tool for Classifying Text Data by UN Sustainable Development Goals,” arXiv (2022).

M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dalam Studi Agama dan Keislaman* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2021).

M. Kabir Hassan, Mervyn K. Lewis, dan Mehmet Asutay, *Handbook of Islamic Banking and Finance* (Cheltenham: Edward Elgar, 2022).

M. Nur Kholis, “Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals,” *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (2023).

M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2022).

M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2021).

Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2010).

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018).

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2021).

Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan dan Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Kanisius, 2022).

Maria Yunita Kosat, Fransiskus Marlon Reu, dan Agnes Kidi Bada Mudamakin, "Pengaruh Perencanaan, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Potensi Pencapaian Tujuan SDGs Desa (Studi Kasus di Desa Naiola Timur)," *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 9, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2809>.

Mark Bovens, Robert E. Goodin, dan Thomas Schillemans, *The Oxford Handbook of Public Accountability* (Oxford: Oxford University Press, 2022).

Mark Stafford-Smith et al., "Integration: The Key to Implementing the Sustainable Development Goals," *Sustainability Science* 12, no. 6 (2017).

Martha C. Nussbaum, *Creating Capabilities* (Cambridge: Harvard University Press, 2021).

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014).

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2020).

Melissa Leach, “Equity and Sustainability in Development,” *Development and Change* 54, no. 1 (2023).

Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World* (Princeton: Princeton University Press, 1980).

Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World* (Princeton: Princeton University Press, 2017).

Michael Hill dan Peter Hupe, *Implementing Public Policy*, 4th ed. (London: Sage, 2022).

Michael Howlett, *Designing Public Policies*, 2nd ed. (London: Routledge, 2019).

Michael Lipsky, *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services* (New York: Russell Sage Foundation, 1980).

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12th ed. (Boston: Pearson, 2015).

Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, 4th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2015).

Michael Redclift dan Delyse Springett, *Routledge International Handbook of Sustainable Development* (London: Routledge, 2022).

Miles, Huberman, dan Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Los Angeles: Sage, 2020).

Mohammad Hashim Kamali, *The Objectives of Islamic Law* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2022).

Mohammad Hashim Kamali, *The Objectives of Islamic Law: The Promises and Challenges of the Maqasid al-Shariah* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2022).

Monzer Kahf, *Islamic Economics and Finance: A Glossary*, 2nd ed. (Kuala Lumpur: IBFIM, 2022).

Muhammad Arrazi, “Maqasid al-Shariah and Sustainable Finance: Analyzing the Impact of Green Sukuk Allocation in Indonesia,” *Muslim Business and Economics Review* 4, no. 1 (2025).

Muhammad Fardh’lu Rizky dan Dadang Mashur, “Penerapan Sustainable Development Goals Desa di Desa Perkebunan Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 15 (2022). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7049684>.

Muhammad Fardh’lu Rizky dan Dadang Mashur, “Penerapan Sustainable Development Goals Desa,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 15 (2022).

Muhammad Iqbal Fasa, “Maqashid Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023).

Muhammad Kosat, Siti Nurjanah, dan Asep Hidayat, “Pengaruh Perencanaan, Transparansi, dan Akuntabilitas Dana

Desa terhadap SDGs Desa,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik* 9, no. 1 (2024).

Muhammad Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: BPFE, 2022).

Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2022).

Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Islamic Foundation, 2021).

Mujalli dan Moh. Syarif, “Model Pengelolaan Dana Desa Berbasis Sustainable Development Goals (SDG’s) Desa,” *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.56998/jr.v7i01.72>.

Nora Haenn, Allison Harnish, dan Richard Wilk, *The Environment in Anthropology*, 2nd ed. (New York: NYU Press, 2022).

Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, ed., *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, 5th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018).

Norman Uphoff, *Local Institutional Development* (West Hartford: Kumarian Press, 2022).

Nur Aini dan Rahmat Hidayat, “Kelembagaan Desa Dinamis dalam Pencapaian SDGs Desa,” *Jurnal Administrasi Desa* 4, no. 2 (2024).

Nur Hidayah dan Arif Rahman, “Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Partisipasi Masyarakat Desa,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 2 (2024).

Nur Ika Mauliyah, Hikmatul Hasanah, dan Miftahul Hasanah, “Potensi Pengembangan Green Sukuk dan Aspek Hukum di Indonesia,” *Ekonomica Sharia* 8, no. 2 (2023).

Nurlaila dan Ahmad Yani, “Pengelolaan APBDes Berbasis Transparansi dan Akuntabilitas,” *Jurnal Akuntansi Publik* 8, no. 1 (2024).

Nurul Aisyah, “Indikator SDGs Desa dalam Perencanaan Pembangunan,” *Jurnal Pemerintahan Desa* 5, no. 2 (2024).

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2022).

Nyimas Nadya Izana, Anik Susanti, dan Bai’aturohani, “Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in Antosari Village, West Selemadeg, Tabanan, Bali,” *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 5, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.15408/jisi.v5i2.40471>.

OECD, *Measuring Distance to the SDG Targets 2022* (Paris: OECD Publishing, 2022).

OECD, *Subnational Government Finance for Sustainable Development* (Paris: OECD Publishing, 2023).

Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

Paul A. Sabatier dan Daniel A. Mazmanian, “The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis,” *Policy Studies Journal* 8, no. 4 (1980).

Paul Cairney, *Understanding Public Policy*, 2nd ed. (London: Red Globe Press, 2020).

Pemerintah Desa Kurungan Nyawa. Buku Profil Desa Kurungan Nyawa 2024. Kurungan Nyawa: Pemerintah Desa Kurungan Nyawa, 2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendesa PDTT Tahun 2020-2024.

Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peter P. Rogers, Kazi F. Jalal, dan John A. Boyd, An Introduction to Sustainable Development, 2nd ed. (London: Routledge, 2021).

Putri Wulandari, “Akuntabilitas APBDes dalam Pembangunan Desa,” Jurnal Ilmu Administrasi Publik 11, no. 1 (2023).

Rafiq Yunus al-Misri, *Usul al-Iqtisad al-Islami* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2021).

Ratih Puspitasari, “Keberlanjutan Program Desa dan Evaluasi Manfaat,” *Jurnal Kebijakan Sosial* 15, no. 2 (2023).

Ratna Dewi, “Belanja Desa dan Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Administrasi Publik* 19, no. 2 (2023).

Reni Febriani dan Suryadi Samudra, “Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa sebagai Upaya Menuju Kemandirian Desa Kotarindau,” *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023).

Reza Fahlevi, “Maqashid Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2023).

Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, dan Etika Kebijakan Publik* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021).

Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, 5th ed. (New York: McGraw-Hill, 1989).

Rini Febrianti, “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDes,” *Jurnal Sains Riset* 14, no. 1 (2024).

Rini Kartika, “Kolaborasi Pemerintah Desa dalam Pencapaian SDGs,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (2023).

Riska Amalia, “Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *Jurnal Governance* 4, no. 2 (2023).

Riska Tyas, Budi Santoso, dan Wulan Sari, “Model Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa untuk Akselerasi SDGs Desa,” *Jurnal Perencanaan Pembangunan* 7, no. 2 (2023).

Robert Chambers, *Rural Development: Putting the Last First* (London: Longman, 1983).

Robert Chambers, *Rural Development: Putting the Last First* (London: Routledge, 2019).

Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018).

Rohman Hidayat, “Analisis Belanja Desa Berbasis Kinerja,” *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* 8, no. 2 (2024).

Rudiarto, Handayani, dan Sardjito, “Sustainable Rural Development in Indonesia,” *Sustainability* 14, no. 5 (2022).

Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022).

Sabina Alkire dan James Foster, “Counting and Multidimensional Poverty Measurement,” *Journal of Public Economics* 95, no. 7-8 (2011).

Sari Dewanti, “Integrasi SDGs Desa dalam APBDes,” *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Desa* 7, no. 1 (2024).

Sherry R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation,” *Journal of the American Institute of Planners* 35, no. 4 (1969).

Siti Khadijah Ab Manan, Fadilah Mansor, dan Azman Ab Rahman, “Maqasid al-Shariah for Sustainable Development,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 6 (2023).

Siti Maryam, “Perencanaan APBDes Berbasis Kebutuhan Masyarakat,” *Jurnal Administrasi Publik* 20, no. 1 (2024).

Soren C. Winter, “Implementation Perspectives: Status and Reconsideration,” dalam *Handbook of Public Administration*, ed. B. Guy Peters dan Jon Pierre (London: Sage, 2022).

Sri Mulyani, “Efektivitas Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi,” *Jurnal Ekonomi Desa* 5, no. 1 (2023).

Sri Wahyuni dan Purnomo, “SDGs Desa dan Pengurangan Kemiskinan,” *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 18, no. 1 (2023).

Steinar Kvale dan Svend Brinkmann, *Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*, 3rd ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2015).

Stephen P. Osborne, *Public Service Logic: Creating Value for Public Service Users, Citizens, and Society through Public Service Delivery* (London: Routledge, 2021).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022).

Sumiati, “Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran,” *Jurnal MODERAT* 4, no. 4 (2018).

Sumiati, “Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa,” *Jurnal MODERAT* 4, no. 4 (2018).

Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014).

Syaiful Bahri dan Erlin Kurniati, “Strategi Pembangunan Berkelanjutan Perkotaan-Pedesaan: Studi Kasus Lampung,” *Global: Jurnal Lentera BITEP* 3, no. 3 (2025).

Tariq Ramadan, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation* (Oxford: Oxford University Press, 2022).

Teguh Kurniawan, “Governance for Sustainable Development at Local Level,” *Jurnal Ilmu Administrasi* 21, no. 1 (2024).

Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, 16th ed. (New York: Pearson, 2021).

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (London: IIIT, 2021).

Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

UN Sustainable Development Solutions Network, *Sustainable Development Report 2023* (Dublin: Dublin University Press, 2023).

UNDP, Human Development Report 2023/2024 (New York: UNDP, 2024).

UNEP, Global Environment Outlook 2024 (Nairobi: UNEP, 2024).

United Nations, The Sustainable Development Goals Report 2024 (New York: United Nations, 2024).

United Nations, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (New York: United Nations, 2015).

Uwe Flick, An Introduction to Qualitative Research, 6th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2022).

V. Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).

V. Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022).

Vivi Alatas et al., "Targeting the Poor: Evidence from a Field Experiment in Indonesia," *American Economic Review* 102, no. 4 (2012).

Wahab Solichin Abdul, Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2021).

Wahyu Hidayat dan Nurul Azizah, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat," *Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan* 3, no. 2 (2022).

Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2021).

William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, 6th ed. (New York: Routledge, 2018).

World Bank, *Village Public Expenditure Review in Indonesia* (Washington DC: World Bank, 2023).

World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987).

Yuni Astuti dan Haris Munandar, “Dana Desa, Kapasitas Aparatur, dan Kualitas Belanja Desa,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 14, no. 1 (2023).

Yury Kashnitsky et al., “Evaluating Approaches to Identifying Research Supporting the United Nations Sustainable Development Goals,” *arXiv* (2022).

Yusuf al-Qaradawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Shariah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2021).

Zainal Abidin, “Maqashid Syariah sebagai Etika Kebijakan Publik,” *Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2024).

Azis, M. Abdul, Abdul Malik Ghozali, dan Ahmad Habibi. “Mustahik Implementation Fīṣabīlillāh in Distribution of Zakat Funds Maqāṣid al-Syarī‘ah Perspective.” *ASAS* 15, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.14501>.

Hanif, Mardhiyah Hayati, dan Desma Susilawati. “Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” *SALAM: Islamic Economics Journal* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24042/slm.v1i1.7023>.

Nurlaili. “Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah).” *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 79–91.

Rosimah, Arnila, dan Nurlaili. “Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung).” *SALAM: Islamic Economics Journal* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24042/slm.v4i2.22542>.

Yulita, Nurma. “Integrating Sustainability and Maqashid Shariah in Islamic Banking: A Systematic Literature Review.” *SALAM: Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2025): 428–437.

Wulandari dan Aulia Mutiara Salma. “Peran Ekonomi Islam dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).” *SALAM: Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2025): 508–519. <https://doi.org/10.24042/yd384r06>.

Kurniawan, Muhammad, dan Alief Rakhman Setyanto. “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2014–2023).” *SALAM: Islamic Economics Journal* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.24042/slm.v5i1.23284>.

Anjani, Putri Selviana, Bagus Dwi Cahyo, Ellen Praditha, Fakhri Danii Alfarizi, dan Heni Noviarita. “Peranan Pemerintah dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Pasca Pandemi Covid-19.” *SALAM: Islamic Economics Journal* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.24042/slm.v4i1.15135>.

Andrian, Jihan, Hanif, dan Yulistia Devi. “Pengaruh CEO Overconfidence, Investment Opportunity Set dan Nilai Perusahaan terhadap Struktur Modal.” *SALAM: Islamic*

Economics Journal 6, no. 2 (2025): 479–498.
<https://doi.org/10.24042/cwpva661>.

Fadila, D. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam.” SALAM: Islamic Economics Journal 4, no. 2 (2023): 109–141.

LAMPIRAN





Lampiran 4. profil desa kurungan nyawa

BUKU PROFIL

**KEC. GEDONG TATAAN
KAB.PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**



Lampiran 4. Dokumentasi Pra Penelitian







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- **2641** /Un.16 /P1 /KT/IV /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**PELUANG PENERAPAN GREEN SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN DESA
BERKELANJUTAN DI DESA KURUNGAN NYAWA KABUPATEN PESAWARAN**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
HELDA PRANITA	2251010062	FEBI/ ES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 23% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 22 Juni 2026



Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP.197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

RADEN INTAN LIBRARY

PELUANG PENERAPAN GREEN SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN DESA BERKELANJUTAN DI DESA KURUNGAN N...

 KARYA ILMIAH 138

Document Details

Submission ID
trnoid::3618:143717413

Submission Date
20 Jun 2026, 21:23 GMT+7

Download Date
22 Jun 2026, 11:03 GMT+7

File Name
HELDA PRANITA 2251010062.docx

File Size
163.0 KB

61 Pages

12,386 Words

86,631 Characters

23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Small Matches (less than 8 words)

Top Sources

- 17%  Internet sources
- 7%  Publications
- 14%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

17%  Internet sources
 7%  Publications
 14%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	journal.um-surabaya.ac.id	1%
2	Internet	journal.dharmawangsa.ac.id	1%
3	Internet	penerbitgoodwood.com	<1%
4	Internet	ejournal.uniib.ac.id	<1%
5	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
6	Internet	prosiding.seminars.id	<1%
7	Student papers	IAIN Purwokerto on 2026-01-19	<1%
8	Internet	ejournal.kopertais4.or.id	<1%
9	Student papers	Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) on 2025-11-12	<1%
10	Student papers	Politeknik STIA LAN Jakarta on 2025-11-03	<1%
11	Internet	issuu.com	<1%

12	Internet	journal.syamilahpublishing.com	<1%
13	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2026-05-18	<1%
14	Internet	journal.itk.ac.id	<1%
15	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
16	Student papers	Universiti Teknologi MARA on 2021-04-30	<1%
17	Internet	ejournal.indo-intellectual.id	<1%
18	Student papers	Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) on 2026-01-19	<1%
19	Student papers	UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi on 2026-05-20	<1%
20	Internet	repository.umsinjai.ac.id	<1%
21	Internet	etd.uinsyahada.ac.id	<1%
22	Student papers	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2026-06-05	<1%
23	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2023-12-19	<1%
24	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2026-01-08	<1%
25	Student papers	IAIN Purwokerto on 2026-06-15	<1%

26	Student papers	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2026-06-14	<1%
27	Student papers	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2026-06-14	<1%
28	Internet	repository.uinfasbengkulu.ac.id	<1%
29	Internet	www.slideshare.net	<1%
30	Student papers	IAIN Samarinda on 2026-02-14	<1%
31	Student papers	Universitas Muhammadiyah Jakarta on 2026-05-26	<1%
32	Internet	link.springer.com	<1%
33	Publication	Mastiah Mastiah, Aura Nabilat En Najla, Wahyu Novriansyah, Rahmah Lia. "Reaks...	<1%
34	Internet	id.123dok.com	<1%
35	Student papers	UIN KH. Achmad Siddiq Jember on 2026-05-20	<1%
36	Student papers	Universitas Islam Malang on 2026-01-19	<1%
37	Publication	Zamzuri, Mohamad. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pemegang Protokol...	<1%
38	Internet	proceeding.uinsuku.ac.id	<1%
39	Internet	www.sungaikepitan.desa.id	<1%

40	Internet	pt.scribd.com	<1%
41	Internet	www.jurnaliainpontianak.or.id	<1%
42	Internet	ejournal.uin-suka.ac.id	<1%
43	Student papers	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2025-04-29	<1%
44	Student papers	UIN Sunan Gunung Djati Bandung on 2025-11-11	<1%
45	Internet	lib.lemhannas.go.id	<1%
46	Student papers	Jabatan Pendidikan Politeknik Dan Kolej Komuniti on 2025-05-29	<1%
47	Student papers	Universitas Islam Indonesia on 2024-01-04	<1%
48	Student papers	Universitas Respati Indonesia on 2026-02-18	<1%
49	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
50	Internet	es.scribd.com	<1%
51	Internet	www.bhuanajaya.desa.id	<1%
52	Internet	www.scribd.com	<1%
53	Publication	Adelia Sonia Fitri, Iizmuddin Iizmuddin. "Strategi Pengelolaan Usahatani Cabai Ra...	<1%

54	Student papers	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2021-06-23	<1%
55	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2021-04-27	<1%
56	Internet	j-cup.org	<1%
57	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2020-08-28	<1%
58	Student papers	University of Durham on 2026-02-12	<1%
59	Internet	mireke.id	<1%
60	Internet	www.mandala.desa.id	<1%
61	Publication	Heru Wahyudi, Ukhti Ciptawaty, Gita P Djausal, Rahmah Dianti Putri. "Studi Kelay..."	<1%
62	Student papers	IAIN Purwokerto on 2025-06-10	<1%
63	Internet	proceedings.uinsgd.ac.id	<1%
64	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
65	Publication	Ima Amaliah, Qaisar Ali, Oktofa Yudah Sudrajad, Sulistya Rusgianto, Harist Nu'ma...	<1%
66	Student papers	Padjadjaran University on 2026-01-01	<1%
67	Internet	core.ac.uk	<1%

68	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
69	Internet	ejournal.pin.or.id	<1%
70	Internet	etheses.iainponorogo.ac.id	<1%
71	Internet	journal.pubmedia.id	<1%
72	Internet	nagamasprima.com	<1%
73	Internet	repository.lpb.ac.id	<1%
74	Internet	repository.unim.ac.id	<1%
75	Publication	Endang Purwaningsih, Basrowi Basrowi. "PENDIRIAN BADAN HUKUM KOPERASI ...	<1%
76	Student papers	IAIN Purwokerto on 2025-10-06	<1%
77	Publication	Muhammad Dhiyaudin, Yayat Sujatna. "MEKANISME PASAR ISLAMIS DALAM TEORI...	<1%
78	Student papers	Universitas Terbuka on 2025-12-10	<1%
79	Student papers	Universitas Terbuka on 2026-02-25	<1%
80	Internet	docobook.com	<1%
81	Internet	jicnusanantara.com	<1%

82	Internet	jurista-journal.org	<1%
83	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
84	Internet	sikabau.desa.id	<1%
85	Student papers	Defense University on 2025-05-15	<1%
86	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-07-29	<1%
87	Publication	Revi Ernanda, Burhanuddin Burhanuddin, Joko Purwono. "Social Capital Characte...	<1%
88	Publication	Rita Masdar, Syukri Iska, Azifah Hidayati. "Etika Produksi dalam Ekonomi Islam se...	<1%
89	Student papers	Sriwijaya University on 2023-07-13	<1%
90	Student papers	UIN KH. Achmad Siddiq Jember on 2026-05-13	<1%
91	Student papers	UINFAS Bengkulu on 2026-05-08	<1%
92	Internet	adoc.pub	<1%
93	Internet	agungyuriandi.blogspot.com	<1%
94	Internet	digilib.isi.ac.id	<1%
95	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%

96	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
97	Internet	iddidy.com	<1%
98	Internet	jurnal.risetilmiah.ac.id	<1%
99	Internet	pintu.co.id	<1%
100	Internet	repo.unand.ac.id	<1%
101	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%
102	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
103	Publication	Cut Afrina, Machsun Rifauddin, Iwin Ardyawin. "Analisis Sistem Pembayaran Digit...	<1%
104	Publication	Febryola Indra, Nova Irene, Sandra Maleachi. "English", Jurnal Gastronomi Indon...	<1%
105	Student papers	IAIN Purwokerto on 2026-06-18	<1%
106	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-07-19	<1%
107	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-07-23	<1%
108	Student papers	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2026-05-22	<1%
109	Publication	Muchammad Tanzila Akhtsani Takwim, Najwa Nada Zahrani, Alvi Dwi Purwindari,...	<1%

110	Publication	Rara Genta Munggarani Basri. "Hifz al-Bi'ah sebagai Maqashid Syariah Kontempo...	<1%
111	Student papers	School of Business and Management ITB on 2025-06-18	<1%
112	Student papers	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-07-26	<1%
113	Student papers	Tarumanagara University on 2025-12-10	<1%
114	Student papers	UIN KH. Achmad Siddiq Jember on 2026-05-12	<1%
115	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2021-04-29	<1%
116	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2021-10-26	<1%
117	Student papers	UIN Sultan Maulana Hasanudin on 2026-02-10	<1%
118	Student papers	UIN Sunan Gunung Djati Bandung on 2026-06-03	<1%
119	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2026-06-19	<1%
120	Publication	Ulum, Afif Saeful. "Manajemen Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Dalam ...	<1%
121	Student papers	Universitas Diponegoro on 2024-03-22	<1%
122	Student papers	Universitas Islam Negeri Mataram on 2026-03-03	<1%
123	Student papers	Universitas Islam Negeri Raden Fatah on 2024-04-15	<1%

124	Student papers	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2026-04-22	<1%
125	Student papers	Universitas Negeri Jakarta on 2025-06-18	<1%
126	Student papers	Universitas Negeri Makassar on 2013-07-18	<1%
127	Student papers	Universitas Negeri Malang on 2026-06-02	<1%
128	Student papers	Universitas Pendidikan Indonesia on 2020-09-20	<1%
129	Student papers	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) on 2021-04-20	<1%
130	Student papers	Universitas Warmadewa on 2017-08-01	<1%
131	Internet	doku.pub	<1%
132	Internet	dspace.uil.ac.id	<1%
133	Internet	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id	<1%
134	Internet	ejurnal.kampusakademik.co.id	<1%
135	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
136	Internet	indojurnal.com	<1%
137	Internet	journal.yrpioku.com	<1%

138	Internet	osc.fhisip.ut.ac.id	<1%
139	Internet	pramudyarum.wordpress.com	<1%
140	Internet	repository-penerbitlitnus.co.id	<1%
141	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
142	Internet	repository.uinjkt.ac.id	<1%
143	Internet	repository.uinpalopo.ac.id	<1%
144	Internet	www.coursehero.com	<1%
145	Internet	www.pekerjadata.com	<1%
146	Internet	www.teknosional.com	<1%

Biografi Penulis



Penulis dengan nama lengkap Helda Pranita dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 Desember 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Helman Arif dan Ibu Rita Hisnara. Riwayat pendidikan penulis dimulai pada tahun ajaran 2009 di Sekolah Taman Kanak-kanak Budaya, dan berhasil menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 02 Sumberjo pada tahun ajaran 2010 dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP 13 Bandar Lampung pada tahun ajaran 2016 dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas ditempuh di SMA 07 Bandar Lampung pada tahun ajaran 2019 dan berhasil diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Nrgri Raden Intan Lampung Program Strata 1 (S1) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2026**

